

WAHANA HIJAU
Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah
ISSN 1858-4004
Volume 4, Nomor 1, Agustus 2008

DAFTAR ISI

- Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Return Saham Syariah di Indonesia**
Chairul Nazwar Hal. 1 – 5
- Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya dengan Kemiskinan di Perdesaan (Studi Kasus di Kabupaten Tapanuli Tengah)**
Dinar Butar-Butar Hal. 6 – 16
- Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya**
Charisma Kuriata Ginting S., Irsad Lubis, dan Kasyful Mahalli Hal. 17 – 24
- Analisis Pengaruh Nilai Tukar Riil terhadap *Trade Flows* Provinsi Sumatera Utara (Kondisi Marshall – Lerner dan Fenomena J-Curve)**
Murianda Hal. 25 – 36
- Cross Border Spatial Cooperation* dalam Konteks Disparitas Ekonomi Wilayah Sumatera Utara**
Sirojuzilam Hal. 37 – 41
- Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Inalum Divisi PLTA Sigura-gura terhadap Pengembangan Sosio-Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir**
Siti Zaleha Hal. 42 – 50

WAHANA HIJAU	Volume 4	Nomor 1	Hal.: 1 – 50	Medan, Agustus 2008	ISSN: 1858-4004
--------------	----------	---------	--------------	---------------------	-----------------

ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM SYARIAH DI INDONESIA

Chairul Nazwar

Dosen Fakultas Ekonomi USU

***Abstract:** The purpose of this study is to know the effect of macroeconomic variables on return of syariah stock in Indonesia. The samples of the study are 22 firms listed in BEI with quarterly data from 2000:01 – 2006:04, by using Ordinary Least Square (OLS) Method and apply the panel data to estimate the impact of macroeconomic variables on return of syariah stock in Indonesia. The result of study indicated that both SBI and Economic Growth significantly effect on Return on syariah stock in Indonesia.*

***Keywords:** macroeconomic variables, return and of syariah stock*

PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal syariah menunjukkan kemajuan seiring dengan meningkatnya indeks yang ditunjukkan dalam *Jakarta Islamic Index*. (JII). Peningkatan indeks pada JII walaupun nilainya tidak sebesar pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetapi kenaikan secara prosentase indek pada JII lebih besar dari IHSG. Hal ini dikarenakan adanya konsep halal, berkah dan bertambah pada pasar modal syariah yang memperdagangkan saham syariah. Pasar modal syariah menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai epistemologi Islam.

Islamisasi Pasar modal yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan akhir akhir ini, telah memainkan beberapa peran penting yang mengubah topography dari sektor keuangan. Hal ini telah menjadi sumber utama dari pertumbuhan pasar modal syariah, dimana produk produk dan pelayanan pasar modal telah diperhatikan untuk diubah menjadi produk-produk dan pelayanan pasar modal syariah. Indeks Islam atau Indeks syariah telah mengambil tempat pada proses Islamisasi pasar modal dan menjadi awal dari pengembangan pasar modal syariah. Beberapa Indeks besar Islam didunia seperti Dow Jones Islamic Market Index (DJMI), RHB syariah Index, Kuala Lumpur Syariah Index (dll) telah berkembang dan telah mulai populer diantara komunitas muslim yang memiliki komitmen dengan prinsip prinsip Islam dalam menjalankan dan memanaajemen investasi

mereka. Karena indeks indeks tersebut diciptakan dengan beberapa batasan-batasan untuk produk produk investasi sesuai dengan syariah. Bahkan non muslim juga ikut masuk berinvestasi di Indeks Islam ini walaupun ada batasan batasannya.

Indeks Islam atau Indeks syariah ini juga telah membantu institusi untuk menginvestasikan kelebihan dananya di investasi yang sesuai dengan syariah ini. Oleh karena itu Bank Islam, Takaful, dan lembaga keuangan syariah lainnya memiliki alternatif untuk menginvestasikan dana mereka dan mendistribusikan keuntungan mereka kepada nasabah nasabah mereka. Di Indonesia Indeks islam telah ada. Kita mengenal Jakarta Islamic Index (JII). Indeks tersebut dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta (yang kini telah menjadi Bursa Efek Indonesia). Ada 30 Emiten yang masuk perhitungan JII, yang dievaluasi setiap 6 bulan. Penentuan komponen Indeks setiap bulan Januari dan Juli.

Perdagangan beberapa jenis sekuritas, baik pada pasar modal konvensional maupun pasar modal syariah mempunyai tingkat *return* dan risiko yang berbeda. Saham merupakan salah satu sekuritas diantara sekuritas-sekuritas lainnya yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Risiko tinggi tercermin dari ketidakpastian *return* yang akan diterima oleh investor di masa datang. Hal ini sejalan dengan definisi investasi menurut Sharpe (1997) bahwa investasi merupakan komitmen dana dengan jumlah yang pasti untuk mendapatkan *return* yang tidak pasti di masa depan.

Dengan demikian, ada dua aspek yang melekat dalam suatu investasi, yaitu *return* yang diharapkan dan risiko tidak tercapainya *return* yang diharapkan. *Return* dan risiko secara teoritis pada berbagai sekuritas mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar *return* yang diharapkan diterima, maka semakin besar risiko yang akan diperoleh, begitu pula sebaliknya. *Return* dan risiko yang tinggi pada saham berhubungan dengan kondisi karakteristik perusahaan, industri dan ekonomi makro.

METODE

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga SBI terhadap Return Saham Syariah (RSS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesa yang diajukan mengenai pengaruh variabel makro ekonomi terhadap Return Saham Syariah.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel (*pooled time series, cross-section data*). Keuntungan dari menggunakan data panel antara lain sebagai berikut:

- Estimasi dengan data panel dapat menunjukkan secara eksplisit setiap *heterogenitas* kedalam perhitungan menurut keunikan dari variabel individual.
- Data panel dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan kurangnya data historis yang diperlukan.

Analisis regresi data panel yang akan dilakukan dalam studi ini adalah dengan menggunakan metode estimasi OLS (*Ordinary Least Square*)

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Saham Syariah diperoleh dari Jakarta Islamic Index (JII). Sementara tingkat suku bunga SBI diperoleh dari BPS dan Bank Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang berbentuk *pooled time series cross section* (data panel) dalam bentuk kuartal (*quarterly*) dari tahun 2000:01-2006:04.

4. Metode Analisis

Untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap Return Saham Syariah, digunakan model ekonometrika sebagai berikut:

$$RSS = \alpha + \beta_1 SBI + \beta_2 EG + \varepsilon$$

Dimana:

RSS = Return Saham Syariah (%)

SBI = Suku Bunga SBI (%)

EG = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

ε = Kesalahan Pengganggu

Alat analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan program *eviews 4.1*

HASIL

Sejak diluncurkannya saham syariah pertama kali, perkembangan instrumen syariah terus mengalami perkembangan walaupun lambat namun pasti, terlebih era tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2006, instrumen syariah yang biasa disebut saham syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu saham syariah sekarang ini ada sekitar 30, sedangkan reksadana sampai saat ini berjumlah 10 reksadana (termasuk 2 reksadana yang tidak aktif/bubar) dan sebanyak 10 (sepuluh) emiten yang telah menerbitkan obligasi berbasis syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karim Business Consulting tahun 2003, mayoritas saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) terdiri dari 333 saham emiten yang tercatat, diantaranya 236 saham sesuai dengan prinsip syariah dan layak untuk ditransaksikan dalam pasar modal syariah. "Kesesuaian dalam prinsip tersebut didasarkan kepada produk yang dihasilkan emiten dan transaksi sahamnya di BEJ. Sedangkan sisanya 59 saham tergolong "haram" atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham perbankan, *consumer product* (minuman keras) dan rokok. Sisanya 34 saham tergolong *subhat* seperti saham industri perhotelan dan 4 saham *mudharat*.

Pada tanggal 3 Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) merupakan "Benchmark" bagi saham-saham yang

berisikan saham-saham likuid dan memenuhi prinsip syariah Islam.

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia.

Anggota JII terdiri dari 30 saham yang mewakili \pm 42% dari kapitalisasi pasar di BEJ dan anggota JII akan ditinjau kembali tiap 6 bulan sekali, tepatnya bulan Januari dan bulan Juni pada tiap-tiap tahunnya.

Berdasarkan Pengumuman BEJ No. Peng-175/BEJ-DAG/U/06-2004 tanggal 25

Juni 2004, anggota JII Periode Juli 2004 s/d Desember 2006, tercantum pada Tabel 1.

Adapun perkembangan instrumen dan transaksi pasar modal sesuai dengan prinsip syariah s.d. September 2006 adalah sebagaimana data pada Tabel 2.

Sesuai dengan tujuan dari studi ini yaitu untuk menganalisa pengaruh variabel makro ekonomi Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan Pertumbuhan Ekonomi (SBI) terhadap Return Saham Syariah (RSS) maka estimasi model dalam studi ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan program Eviews 4.1, Hasil regresi dengan menggunakan panel data dinamis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 1. Anggota JII Periode Juli 2004 s.d. Desember 2006

No.	Nama Emiten	No.	Nama Emiten
1	Aneka Tambang (Persero)	16	Kawasan Industri Jababeka
2	Astra Agro Lestari	17	Limas Stokhomindo
3	Astra Graphia	18	London Sumatera
4	Bakrie & Brothers	19	Multipolar
5	Barito Pacific Timber	20	Perusahaan Gas Negara (Persero)
6	Bumi Resources	21	Semen Cibinong
7	Ciputra Development	22	Semen Gresik (Persero)
8	Dankos Laboratories	23	Summarecon Agung
9	Enseval Putra Megatrading	24	Tambang Batubara Bukit Asam
10	Gajah Tunggal	25	Telekomunikasi Indonesia
11	Indocement Tunggul Prakasa	26	Tempo Scan Pacific
12	Indofood Sukses Makmur	27	Timah
13	Indosat	28	Trias Sentosa
14	International Nickel Ind	29	Unilever Indonesia
15	Kalbe Farma	30	United Tractors

Sumber: Jakarta Islamic Index

Tabel 2. Penerbit Saham Syariah s.d. September 2006

No.	Instrumen Inv. Syariah	Total (Juta Rp)	Indikasi Return %
1	Indosat Syariah Mudharabah (2002)	175	16.75
2	Bank Muamalat Syariah Subordinasi	200	17
3	Cilindra Perkasa I Th. 2003	60	14
4	Bukopin Syariah Mudharabah 2003	45	15
5	Berlian Laju Tanker Mudharabah 2003	60	13
6	BSM Mudharabah 2003	200	13
7	Syariah PTPN VII 2004	75	13.5
8	Matahari Putra Prima Ijarah	150	13.8
9	Sona Topas Tourism Ijarah	52	13.5
10	Citra Sari Makmur Ijarah 2004	100	14.5

Sumber: Jakarta Islamic Index

Tabel 3. Hasil Estimasi Perhitungan Model dengan Data Panel

Variabel Terikat : RSS; Periode Estimasi dari 2000:01 sampai 2006:04
 Nilai Koefisien:

Variabel Bebas	coeff.	std.error	t-stat.	Prob.
SBI	-4.158354	0.348343	-11.937	0.0052
EG	2.077682	0.266812	7.787	0.0096
R-Squared	0.637234			
R-bar Square	0.564985			
F Stat.	28.03226			
DW Stat.	2.130879			

Sumber: Output Eviews 4.1 (diolah)

Tabel 3, mengindikasikan bahwa Return Saham Syariah (RSS) pada periode 2000:01 sampai 2006:04 dipengaruhi secara signifikan oleh Pertumbuhan ekonomi (EG) dan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dengan arah hubungan tanda yang sesuai dengan hipotesis. Tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap return saham syariah. Terjadinya kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) 1% akan diikuti dengan penurunan Return Saham Syariah sebesar 4.16%. Return Saham Syariah juga dipengaruhi secara positif oleh Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (EG), dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1% akan meningkatkan Return Saham Syariah 2.08%.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa model tersebut cukup *robust* dengan nilai R^2 0.637. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel bebas dalam model (Suku Bunga Bank Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi) hanya mampu menjelaskan variasi pengaruh dari variabel tergantung (Return Saham Syariah) sebesar 64%, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel residual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas penelitian Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Return Saham Syariah Di Indonesia, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham Syariah di Indonesia
2. Suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham Syariah di Indonesia.

SARAN

1. Diharapkan bagi otoritas moneter (Bank Indonesia) supaya dapat menurunkan tingkat suku bunga SBI secara bertahap atau paling tidak tetap dalam keadaan stabil, hal ini dikarenakan tingkat suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah
2. Bagi penelitian selanjutnya perlu menambah variabel-variabel ekonomi makro dan industri atau mengganti dan menambah variabel-variabel karakteristik perusahaan yang lain yang dimungkinkan relevan dengan return saham syariah serta menambah periode waktu penelitian
3. Bagi penelitian selanjutnya perlu dilakukan pengujian variabel-variabel makro ekonomi, industri dan karakteristik perusahaan dengan return saham non syariah serta menguji perbedaan antara return saham syariah dengan return saham non syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Achsien, H. Iggi. 2000., *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Aruzzi, M. Iqbal, dan Bandi, 2003, Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Rasio Profitabilitas, dan Beta Akuntansi Terhadap Beta Saham Syariah di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Beaver, William, Paul Kettler, dan Myron Scholes, 1970, The Association Between Market Determined and Accounting Determined Risk Measure, *The Accounting Review* 45, p. 654-682.

- Bowman, Robert G., 1979., The Teoretical Relationship Between Systematic Risk and Financial (Accounting) Variable, *The Journal of Finance*, Vol XXXIV, No. 3, June, p. 617-630.
- Hamada, Robert S., 1972, The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, *Journal of Finance*, May, 435-451.
- Harahap, Sofyan S, 2001, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Quantum.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Penerbit Yayasan Kalimah.
- Husnan, Suad, 1994, Analisis Sekuritas di Pasar Modal Kecil: Pengamatan di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.9, No. 1.
- Jogiyanto, 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Jones, Charles.P. 2004, *Investments Analysis and Management*, 9th edition, New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
- Kapoor, Ajai K dan Pope, Ralph A, 1997, The Relationship Between Corporate Debt Issuance and Change in Systematic Risk, *Journal of Financial and Strategic Decision*, Vol. 10, No.3, pp. 13-22.
- Mahadwartha, Putu Anom, 2001, Analisis Ekonometri: Pengaruh Return, Volume Transaksi dan Resiko Unik Saham Terhadap Beta Perusahaan pada Industri Rokok, *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, hal.171-176.
- Miswanto, dan Husnan, Suad, 1999, *The Effect of Operating Leverage, Cyclicity, and Firm Size on Business Risk*, Gadjah Mada International Journal of Business, Vol. 1 No.1, pp. 29-43.
- Natarsyah, Syahib, 2000, Analisa Pengaruh Beberapa Faktor Fundamental dan Risiko Sistemik Terhadap Harga Saham, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 3, hal. 294-312.
- Setiawan, Doddy, 2004, Analisis Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Risiko Sistematis Sebelum dan Selama Krisis Moneter, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 19, No.3, hal. 224-237.
- Suciwati, Desak Putu dan Machfoedz Mas'ud, 2002, Pengaruh Risiko Nilai Tukar Rupiah Terhadap Return Saham: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17No. 4, hal.347-360.

ANALISIS SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN DI PERDESAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH)

Dinar Butar-Butar

BPS Tapanuli Tengah & Alumnus S2 PWD SPs USU

***Abstract:** Rural poverty very often becoming the reason for urbanization. Based on the research result, show that education level of the family, member of family, occupation and economic resources ownershi, whole together significantly influence upon poverty of household in rural area. Educational level of the household generally still very low, weather the poor or non poor family. Poor household in rural area also tend to have no household economic resources*

***Keywords:** poverty and sosio- economic*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan primer kehidupannya. Menurut Poerwadarminto (1976), secara harafiah kata miskin berarti tidak berharta benda. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya. Standar minimal kebutuhan hidup ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain karena sangat bergantung pada kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kuncoro (1997:103) menyatakan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup atau dengan kata lain ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan atau konsumsi individu (makan, perumahan dan pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan).

Melihat kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam proses pembangunan pada saat ini, pada tahun-tahun mendatang kemiskinan akan bergeser dari Perdesaan ke daerah perkotaan. Hal ini didukung laju industriliasi yang berskala besar seperti pertambangan dan perkebunan besar yang akan menambah tekanan pada penduduk di Perdesaan untuk melepas tanah mereka untuk digunakan sebagai lahan industri. Guna memenuhi kebutuhan hidup, penduduk miskin di perdesaan melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan, yang akhirnya menjadi beban daerah perkotaan. Mereka menambah jumlah penduduk miskin di perkotaan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi konsentrasi besar-besaran orang miskin di daerah perkotaan. (Soetrisno 1997: 42). Kemiskinan tak teratasi baik di perkotaan maupun di Perdesaan, apabila perencanaan pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan tidak terpadu. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran saya untuk mengambil penelitian mengenai kemiskinan di Perdesaan, dengan asumsi apabila kemiskinan di perdesaan dapat diatasi maka urbanisasi berkurang dan sekaligus salah satu penyebab kemiskinan perkotaan teratasi. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: a) apakah kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang terdiri dari: tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jenis pekerjaan, dan kepemilikan sumberdaya ekonomi memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di perdesaan. b) apakah ada perbedaan tingkat pendidikan

kepala rumah tangga yang signifikan antara status rumah tangga (miskin dan bukan miskin) di pedesaan? c) apakah ada pengaruh yang signifikan antara status rumah tangga (miskin dan bukan miskin) dengan jumlah anggota rumah tangga di pedesaan? d) apakah ada pengaruh yang signifikan antara status rumah tangga (miskin dan bukan miskin) dengan jenis pekerjaan kepala rumah tangga (pertanian dan bukan pertanian) di pedesaan? e) apakah ada pengaruh yang signifikan antara status rumah tangga (miskin dan bukan miskin) dengan kepemilikan sumber daya ekonomi rumah tangga di pedesaan?.

METODE

Sampel pada penelitian berjumlah 300 rumah tangga yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Penarikan sampel dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah penentuan sampel wilayah daerah pedesaan dan tahap kedua penentuan sampel rumah tangga. Penentuan sampel wilayah daerah pedesaan dengan menggunakan Metode Cluster Random Sampling. Wilayah Desa dan Kelurahan dibedakan menjadi Daerah Perkotaan dan Daerah Pedesaan.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dalam hal ini kondisi sosial ekonomi rumah tangga terhadap miskin atau tidaknya rumah tangga, yang terdiri dari: jenis pekerjaan, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan kepemilikan sumber daya ekonomi. Dalam studi ini metode penduga digunakan model *Multiple Logistic Regression Model*. Menurut Amar (1999), model tersebut dapat menunjukkan probabilitas suatu rumah tangga berada dalam kemiskinan sebagai akibat adanya variabel-variabel bebas yang diduga sebagai faktor penyebab kemiskinan. Peluang tersebut merupakan suatu peluang bersyarat yang didasarkan pada suatu asumsi mengenai variabel random yang diteliti berbentuk distribusi fungsi pecah (*logistic distribution function*). Gujarati (1993) menyatakan bahwa bentuk persamaan *logistic distribution function* adalah sebagai berikut:

$$P_i = EY = \frac{1}{X_i} = \frac{1}{1 + e^{-(B_1 + B_2 X_i)}} \quad (1)$$

Model spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (kondisi sosial ekonomi) terhadap variabel terikat (kemiskinan) adalah sebagai berikut:

$$L_i = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + B_4 X_4 + U_i \quad (6)$$

Keterangan:

L_i : Peluang miskin atau tidaknya suatu rumah tangga

B_0 : Intersep garis regresi

X_1 : Pendidikan kepala rumah tangga (1 = bila tidak tamat SD atau Tamat SD atau tamat SMP; dan 0 = bila tidak)

X_2 : Jumlah anggota rumah tangga (Jiwa)

X_3 : Jenis pekerjaan utama kepala rumah tangga (1 = Sektor pertanian dan 0 = di luar sektor pertanian)

X_4 : Kepemilikan sumber daya ekonomi dimana nilai 1 apabila rumah tangga tidak memiliki sumberdaya ekonomi dan diberi nilai 0 bila memilikinya

U_i : Kesalahan pengganggu

Untuk mengetahui kemungkinan sebuah rumah tangga berstatus miskin sebagai akibat pengaruh satu variabel bebas (kondisi sosial ekonomi rumah tangga), dapat digunakan model statistik *Odds Ratio* dengan formula sebagai berikut:

$$OR = e^{bi}$$

Keterangan:

OR : *Odds Ratio*

e : Log Natural, = 2,71828

bi : koefisien regresi variabel ke-i

HASIL

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di 11 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Pinang Sori, Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Tukka, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Sorkam, dan Kecamatan Manduamas.

Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 2.194,98 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau-pulau kecil di

sekitar wilayah kabupaten ini. Kecamatan Sibabangun merupakan kecamatan yang terluas, dengan luas 439,99 km² atau sekitar 20,05 persen dari luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 sebanyak 291.248 orang dengan komposisi laki-laki 146.194 orang (50,20%) dan perempuan 145.054 orang (49,80%), sehingga seks ratio penduduk wilayah ini 100,79 persen. Angka ini berarti bahwa setiap 10.000 orang perempuan terdapat 10.079 orang laki-laki. Jadi secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2006 atas harga berlaku sebesar 1.453,76 milyar Rupiah. Sektor Pertanian merupakan kontributor utama dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu mencapai 46,22%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Jasa-jasa (16,74%), Industri pengolahan (15,69%), dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (10,77%), sedangkan sektor-sektor yang lain hanya memberi kontribusi di bawah 10%.

Besarnya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah (46,22%) menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah lebih mengandalkan sektor pertanian, yang berarti sumber ekonomi masyarakat bersumber dari hasil pertanian, yakni dominan bersumber dari sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan rakyat, serta sub sektor perikanan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli tahun 2006 sebesar 5,23%, Pendapatan per kapita pertahun penduduk pada tahun 2006 sekitar 4,86 juta rupiah.

PEMBAHASAN

Pendapatan Rumah Tangga dan Pendapatan Perkapita

Pendapatan rumah tangga dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Pengeluaran terdiri dari pengeluaran bahan makanan dan non

makanan. Data menggambarkan bahwa persentase rumah tangga terbesar adalah pada golongan pendapatan Rp 500.001,- – Rp1.000.000,- per bulan, yaitu sebanyak 56,4 persen atau dari 300 rumah tangga yang dijadikan sampel penelitian ada 169 rumah tangga yang mempunyai pendapatan antara Rp500.001,-.- Rp1.000.000,- per bulan. Bila dikaitkan dengan kemiskinan yang terjadi di perdesaan, pada golongan pendapatan ini, jumlah rumah tangga berstatus miskin lebih banyak dari jumlah rumah tangga berstatus bukan miskin, yaitu 50,9 persen rumah tangga miskin dan 49,1 persen rumah tangga bukan miskin.

Selanjutnya ada 25 rumah tangga atau sekitar 16,0 persen berpenghasilan di bawah Rp500.000,- per bulan, dengan distribusi 52,1 persen merupakan rumah tangga bukan miskin dan 47,9 persen merupakan rumah tangga miskin. Pada golongan pendapatan Rp 1.000.001,- – Rp 1.500.000,- per bulan, terdapat 55 rumah tangga atau 18,3 persen, yang terdiri atas 13 rumah tangga miskin atau 23,63 persen dan 42 rumah tangga bukan miskin atau 76,37 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 28 rumah tangga atau 9,3 persen mempunyai pendapatan di atas Rp 1.500.000,- per bulan yang keseluruhannya merupakan rumah tangga bukan miskin

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa suatu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp 500.000,- per bulan belum tentu miskin namun bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas Rp 1.500.000,- per bulan tergolong rumah tangga bukan miskin.

Pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan di daerah penelitian sebesar Rp.956.657,9,- dengan nilai pendapatan minimum Rp 169.369,- per bulan dan pendapatan maksimum Rp 6.378.557,- per bulan.

Besarnya nilai pendapatan yang diperoleh rumahtangga belum bisa dijadikan sebagai patokan garis kemiskinan. Pendekatan yang dipakai adalah pendapatan perkapita rumah tangga yaitu nilai pendapatan rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga.

Keseluruhan rumah tangga miskin yang menjadi sampel penelitian, yakni

sebanyak 122 rumah tangga (47,3 persen) dari sampel 300 rumah tangga, pendapatan perkapitanya berada di bawah Rp 131.256,- per bulan, dimana besaran tersebut merupakan nilai batas garis kemiskinan yang digunakan sebagai pengkategorian rumah tangga miskin. Dari 122 rumah tangga miskin tersebut masih terdapat rumah tangga yang tingkat pendapatan perkapitanya di bawah Rp 100.000 per bulan, yaitu sebanyak 23 rumah tangga.

Sedangkan 178 rumah tangga lainnya merupakan rumah tangga bukan miskin dengan tingkat pendapatan per kapita per bulan di atas Rp 131.256,-. Bila diklasifikasikan lagi tingkat pendapatan perkapita rumah tangga bukan miskin tersebut, maka diperoleh gambaran bahwa sebagian besar rumah tangga bukan miskin mempunyai pendapatan perkapita per bulan antara Rp 131.257,- - Rp 262.512,-, dengan jumlah 115 rumah tangga atau 38,3 persen dan sisanya 34 rumah tangga (11,3 persen) mempunyai tingkat pendapatan perkapita Rp 262.513,- – Rp 393.768,- per bulan; dan 29 rumah tangga (9,7 persen) pendapatan per kapita di atas Rp 393.768,- per bulan. Pendapatan perkapita rata-rata rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp 228.318,8,- per bulan, dengan pendapatan perkapita minimum Rp.74.333,33,- per bulan, dan pendapatan perkapita maksimum sebesar Rp.1.799.062,- per bulan. Dari angka ini diperoleh secara rata-rata rumah tangga di daerah penelitian tergolong rumah tangga bukan miskin bila dibandingkan dengan batas garis kemiskinan BPS yaitu sebesar Rp 131.256,- per kapita per bulan (Susenas 2006).

Kepemilikan Rumah

Di samping kebutuhan akan pangan dan sandang, perumahan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang cukup vital. Keadaan tempat tinggal rumah tangga dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan khususnya di bidang perumahan, dan sampai seberapa jauh program perumahan nasional dapat menjangkau golongan masyarakat yang memerlukan perumahan..

Pada daerah penelitian, dari 300 rumah tangga sampel terdapat 198 rumah tangga atau sekitar 66,0 persen yang kepemilikan rumahnya merupakan milik sendiri, yang terdiri atas 120 rumah tangga atau sekitar 40 persen merupakan rumah tangga bukan miskin dan 78 rumah tangga atau 26 persen merupakan rumah tangga miskin.

Walau status kepemilikan rumah pada daerah penelitian merupakan milik sendiri yang terbanyak, namun dari segi besaran maka persentase rumah tangga yang kepemilikan rumahnya bukan milik sendiri juga cukup besar, yaitu sekitar 34,0 persen atau 102 rumah tangga, yang terdiri atas 58 rumah tangga bukan miskin dan 44 rumah tangga miskin.

Pendidikan

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga cukup bervariasi yaitu dari kepala rumah tangga yang berpendidikan tidak tamat SD sampai berpendidikan sarjana. Tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh kepala rumah tangga di daerah perdesaan di daerah penelitian adalah Tamat SD, kemudian disusul dengan tidak Tamat SD. Jumlah kepala rumah tangga pada daerah perdesaan di daerah penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga berpendidikan hanya sampai Tamat SD. Pada kedua tingkat jenjang pendidikan ini, jumlahnya cukup besar baik pada rumah tangga miskin dan rumah tangga bukan miskin, yaitu sebanyak 186 rumah tangga atau 62 persen dari 300 rumah tangga sampel. Kumulatif jumlah rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga hanya hingga tamat SMP (tidak tamat SD + Tamat SD + Tamat SMP) mencapai 80,70 persen.

Jumlah Anggota Rumah Tangga

Sebanyak 145 rumah tangga atau sekitar 48,3 persen dari 300 rumah tangga sampel penelitian mempunyai jumlah anggota rumah tangga antara 1 sampai 4, yang terdiri dari Ayah, Ibu dan 2 orang Anaknya. Namun persentase ini tidak jauh berbeda dengan persentase jumlah rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga 5 – 8 orang, yaitu sekitar 45,0 persen atau 135 rumah tangga. Dan jumlah

rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga lebih dari 8 orang sebesar 6,7 persen atau sebanyak 20 rumah tangga.

Jika melihat perimbangan jumlah rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga 1 – 4 orang dengan jumlah rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga 5 - 8 orang, maka dapat diartikan bahwa program Keluarga Berencana belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu masih diperlukan upaya yang lebih lagi agar program keluarga berencana di daerah ini dapat memberi hasil yang lebih optimal. Rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga sedikit atau 1 – 4 orang didominasi oleh rumah tangga bukan miskin, yaitu sekitar 40 persen. Rumah tangga miskin umumnya mempunyai jumlah anggota rumah tangga 5 - 8 orang, yaitu sebanyak 79 rumah tangga atau sekisar 26,4 persen dari 40,7 persen jumlah rumah tangga miskin. Dan pada kelompok rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga di atas 8 orang didominasi rumah tangga miskin yakni 18 rumah tangga (90, 0 persen) dari 20 rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota rumah tangga 8 orang ke atas.

Dari 122 sampel rumah tangga miskin, 97 rumah tangga atau 70,51 persen mempunyai jumlah anggota rumah tangga 5 orang ke atas, sedangkan dari 178 sampel rumah tangga bukan miskin, 120 rumah tangga atau 67,41 persen diantaranya mempunyai jumlah anggota rumah tangga di bawah 5 orang.

Bila dilihat dari uji keselarasan (*goodness of fit test*) yang diukur dengan nilai Chi Square pada bagian bawah uji Hosmer dan Lemeshow dimana angka probabilitas adalah 0,376, angka ini masih lebih besar dari 0,10 ($\alpha = 10$ persen), yang memberi arti bahwa model regresi layak dipakai untuk analisis, karena tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati (Singgih Santoso, 2006: 103). Selanjutnya untuk menilai signifikan keseluruhan model (*overall model fit*) dilihat dari angka -2 Log Likelihood. Pada awal (Block Number = 0), angka -2 LL adalah 406,373, sedangkan pada Block number = 1, angka - 2 LL turun menjadi 270,370. Adanya penurunan angka ini menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik. Selain itu, jika dilihat dari tabel klasifikasi keseluruhan (*overall classification table*) terlihat peningkatan *overall hit ratio*, yaitu 59,3 persen pada model regresi 1 ke 79,3 persen pada model regresi 2. Peningkatan nilai *overall hit ratio* ini menunjukkan model regresi lebih baik.

Untuk Pengujian signifikan tiap – tiap parameter atau secara sendiri digunakan Uji Wald (*Wald Test*). Dilihat dari kriteria atau uji Wald diperoleh hasil bahwa pada tingkat signifikancy $\alpha = 0,10$ dari 4 variabel bebas (*independent variabele*) yang digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap miskin tidaknya rumah tangga di perdesaan, keempat variabel memberikan pengaruh nyata atau signifikan. Keempat variabel yang signifikan tersebut adalah: tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jenis pekerjaan, dan kepemilikan sumber daya ekonomi.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Logistik Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga terhadap Status Kemiskinan di Perdesaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007

Variabel	Nilai Dugaan (Koefisien)	Nilai Wald Test	Significant	Odds Ratio (Exp X)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenjang Pendidikan	0,730	2,982	0,084*	2,074
Jumlah Anggota Rumah Tangga	0,734	61,223	0,000***	2,084
Jenis Pekerjaan	1,352	12,073	0,001***	3,867
Kepemilikan Sumber Daya Ekonomi	1,216	15,590	0,000***	3,374
Konstanta	-6,192	66,664	0,000***	0,02

Sumber: Diolah dari data primer

Keterangan: *** : Signifikan pada tingkat keyakinan $\alpha = 0,01$
 ** : Signifikan pada tingkat keyakinan $\alpha = 0,05$
 * : Signifikan pada tingkat keyakinan $\alpha = 0,10$

Persamaan Regresi Logistic yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Miskin} = - 6,192 + 0,73 X_1 + 0,734 X_2 + 1,352 X_3 + 1,216 X_4 + U$$

Dimana:

X_1 : Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

X_2 : Jumlah Anggota Rumah Tangga

X_3 : Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

X_4 : Kepemilikan Sumber Daya Ekonomi Rumah Tangga

Analisis Deskriptif

- Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Di daerah perdesaan sektor pertanian memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian masyarakat perdesaan, khususnya masyarakat miskin. Dalam penelitian ini sektor pertanian di bedakan atas 3 kelompok, yakni sub sektor perikanan, tanaman pangan dan perkebunan

Data menggambarkan bahwa baik kepala rumah tangga yang berstatus miskin dan kepala rumah tangga bukan miskin terdistribusi pada keempat kelompok jenis pekerjaan tersebut. Dimana rumah tangga miskin pada umumnya bekerja di sektor pertanian baik pada sub sektor perikanan, maupun sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan. Dari 122 (40,7 persen) responden rumah tangga miskin sebanyak 103 rumah tangga (34,4 persen) bekerja di sektor pertanian, dengan rincian 24 RT (8 persen) pada sub sektor perikanan, dan 37 RT (12,4 persen) pada sub sektor tanaman pangan, serta 42 RT (14,0 persen) pada sub sektor perkebunan.

Kondisi di lapangan ditemui rumah tangga yang bekerja di sub sektor perkebunan dibedakan atas 2 kelompok, yakni kelompok rumah tangga bekerja sebagai petani perkebunan bagi hasil (petani tetapi bukan pemilik perkebunan) dan kelompok rumah tangga sebagai petani pemilik perkebunan. Petani perkebunan bagi hasil umumnya merupakan rumah tangga miskin namun petani perkebunan pemilik perkebunan umumnya kehidupan ekonomi rumah tangganya lebih baik atau cenderung bukan miskin.

Disisi lain dari 178 (59,3 persen) rumah tangga bukan miskin, jenis pekerjaan kepala rumah tangga pada umumnya di sub

sektor perkebunan dan bukan sektor pertanian (lainnya), yakni berjumlah 131 RT (43,7 persen) persen dengan rincian di sub sektor perkebunan 63 rumah tangga (21,0 persen) dan di sektor bukan sektor pertanian (lainnya) sebanyak 68 rumah tangga (22,7 persen)

Dari uraian di atas terindeksi bahwa pekerjaan kepala rumah tangga dari rumah tangga miskin cenderung bekerja di sektor pertanian baik pada sub sektor perikanan, tanaman pangan maupun sub sektor perkebunan.

- Kepemilikan Sumber Daya Ekonomi

Kepemilikan sumberdaya ekonomi rumah tangga adalah kepemilikan rumah tangga terhadap sesuatu benda atau kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan lainnya di luar pekerjaan utamanya. Pendapatan lainnya ini bisa diperoleh secara berkala atau periodik maupun pada waktu tertentu sesuai dengan kemauan si pemilik (sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan). Adapun contoh dari sumber daya ekonomi rumah tangga adalah sebagai berikut: memiliki perhiasan emas, lahan, warung/kedai/toko, wartel/salon, bengkel/reprerasi elektronik dan usaha lainnya.

Dari 300 rumah tangga yang diteliti sebanyak 167 rumah tangga atau sekitar 55,7 persen yang memiliki sumber daya ekonomi dalam menunjang perekonomian rumah tangga dan sebanyak 133 rumah tangga atau sekitar 44,3 persen yang tidak memiliki sumber daya ekonomi

Bila dilihat dari status kemiskinan rumah tangga terlihat bahwa rumah tangga miskin pada umumnya tidak memiliki sumber daya ekonomi, yaitu 73 rumah tangga atau sekitar 59,84 persen dari 122 sampel rumah tangga miskin.

Sedangkan rumah tangga bukan miskin pada umumnya memiliki sumber daya ekonomi, yaitu 118 rumah tangga atau sekitar 66,29 persen dari 178 sampel rumah tangga bukan miskin.

Pengujian Hipotesis

Pada Bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa 5 hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Hasil pengujian masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil pengolahan program SPSS versi 11,5 diperoleh nilai $\text{significancy} = 0,376 > 0,10$ dan nilai Chi Kuadrat hitung $= 8,613 < \text{nilai Chi Kuadrat tabel dengan } dk = 8 (13,40)$ pada tingkat signifikansi 10 persen. Maka H_0 ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi rumah tangga meliputi: jenis pekerjaan kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga jumlah anggota rumah tangga, dan kepemilikan sumber daya ekonomi rumah tangga secara bersama-sama menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan.

Berdasarkan dari hasil analisis pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 11,5 diperoleh nilai Kontingensi (Continuity Correction) Chi Kuadrat (X^2) hitung sebesar 5,389 sedangkan hasil perolehan nilai tabel dengan $dk = 1, X^2 = 2,71$ pada tingkat signifikansi 10 persen. Nilai X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai X^2 tabel menyatakan bahwa H_0 ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada level signifikansi $\alpha = 1$ persen, tingkat pendidikan kepala rumah tangga secara terpisah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan atau tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin berbeda nyata dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga bukan miskin.

Berdasarkan dari hasil analisis pengolahan data diperoleh nilai Chi Kuadrat (X^2) hitung sebesar 87,688 sedangkan hasil perolehan nilai tabel dengan $dk = 9, X^2 = 14,70$ pada tingkat signifikansi 10 persen. Nilai X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai X^2 tabel menyatakan bahwa H_0 ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa besaran jumlah anggota rumah tangga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan. Dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan antara status kemiskinan atau

miskin tidaknya suatu rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil analisis pengolahan data dengan menggunakan Tabel Kontingensi (Continuity Correction) diperoleh nilai Chi Kuadrat (X^2) hitung sebesar 16,919 sedangkan hasil perolehan nilai tabel dengan $dk = 1, X^2 = 2,71$ pada tingkat signifikansi 10 persen. Nilai X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai X^2 tabel menyatakan bahwa H_0 ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan kepala rumah tangga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan. Dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan antara status kemiskinan atau miskin tidaknya suatu rumah tangga dengan jenis pekerjaan kepala rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil analisis pengolahan data dengan menggunakan Tabel Kontingensi (continuity correction) diperoleh nilai Chi Kuadrat (X^2) hitung sebesar 18,979 sedangkan hasil perolehan nilai tabel dengan $dk = 1, X^2 = 2,71$ pada tingkat signifikansi 10 persen. Nilai X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai X^2 tabel menyatakan bahwa H_0 ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sumber daya ekonomi (asset) rumah tangga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan. Dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan antara status kemiskinan atau miskin tidaknya suatu rumah tangga dengan kepemilikan sumber daya ekonomi rumah tangga.

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya ditemukan bahwa diperoleh nilai Chi-Kuadrat sebesar 8,613 dan nilai signifikansi 0,376, maka signifikan pada tingkat keyakinan $\alpha = 0,10$. Artinya secara bersama-sama keempat variabel meliputi, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, jenis pekerjaan dan kepemilikan sumber daya ekonomi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan. Bila dilihat secara terpisah (parsial) dengan menggunakan Uji

Wald maupun uji Chi – Kuadrat masing-masing keempat variabel juga menunjukkan hubungan yang berarti dengan kemiskinan rumah tangga di perdesaan.

Variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan dengan tingkat keyakinan $\alpha = 10$ persen.. Kemiringan atau *slope* variabel ini, yaitu 0,730 memberi arti bahwa proporsi rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga sampai Tamat SMP tergolong miskin lebih besar dari pada proporsi rumah tangga yang tingkat pendidikannya di atas Tamat SMP. Angka Odds ratio sebesar 2,982 menunjukkan bahwa resiko rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga sampai SMP untuk tergolong rumah tangga miskin adalah 2,982 kali atau 2,982 persen bila dibandingkan resiko rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga di atas Tamat SMP

Variabel jumlah anggota rumah tangga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan pada tingkat keyakinan 0,10 persen. Kemiringan atau *slope* variabel ini, yaitu 0,734 memberi arti bahwa setiap perubahan atau penambahan jumlah anggota rumah tangga dalam suatu rumah tangga, maka kemungkinan atau probabilitas rumah tangga untuk menjadi rumah tangga miskin sekitar 0,734 kali atau 73,40 persen. Kondisi tersebut terjadi bila variabel-variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*) Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota rumah tangga pada sebuah rumah tangga di daerah perdesaan semakin besar peluang untuk menjadi miskin.

Variabel jenis pekerjaan dari kepala rumah tangga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan pada tingkat keyakinan 0,10 persen. Kemiringan atau *slope* variabel ini, yaitu 1,352 memberi arti proporsi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian untuk tergolong miskin lebih besar dari pada proporsi rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian (lainnya). Angka Odds ratio sebesar 3,867 menunjukkan bahwa resiko

rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor pertanian untuk tergolong rumah tangga miskin adalah 3,867 kali atau 386,7 persen bila dibandingkan resiko rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja di luar sektor pertanian (lainnya). Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor pertanian memiliki resiko lebih besar untuk tergolong rumah tangga miskin.

Variabel kepemilikan sumber daya ekonomi rumah tangga, meliputi kepemilikan akan tanah pertanian, warung/toko/kedai, wartel/salon, bengkel/reparasi elektronik, dan usaha lainnya, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan pada tingkat keyakinan 0,01 persen. Kemiringan atau *slope* variabel ini, yaitu 1,216 memberi arti proporsi rumah tangga yang tidak memiliki sumber daya ekonomi untuk tergolong miskin lebih besar dari pada proporsi rumah tangga yang memiliki sumber daya ekonomi Angka Odds ratio sebesar 3,374 menunjukkan bahwa resiko rumah tangga yang tidak memiliki sumber daya ekonomi untuk tergolong rumah tangga miskin adalah 3,374 kali atau 337,4 persen bila dibandingkan resiko rumah tangga yang memiliki sumber daya ekonomi. Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang tidak memiliki sumber daya ekonomi memiliki resiko lebih besar untuk tergolong rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki sumber daya ekonomi.

Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah

Salah satu visi pembangunan ekonomi periode 2004 - 2009 adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu membuka lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja sekaligus mengatasi kemiskinan, dengan menempuh dua strategi utama, yaitu: 1) meningkatkan pendapatan dan 2) mengurangi beban hidup penduduk miskin.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 1999 dan 2002 – 2005

Rincian	1999	2002	2003	2004	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	54,5	74,70	86,69	87,10	93,73
% Penduduk Miskin	21,10	29,89	31,50	31,47	32,76

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2006

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga memberi pengaruh yang signifikan terhadap miskin tidaknya suatu rumah tangga di perdesaan. Disisi lain juga dijelaskan bahwa tingkat pendidikan dari masyarakat di daerah penelitian sangat memprihatinkan, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, dimana 62 persen tingkat pendidikan kepala rumah tangga hanya sampai tamat SD. Selain disebabkan kemiskinan hal ini juga tidak terlepas dari pola pikir masyarakat khususnya masyarakat pesisir, yang berasumsi bahwa peningkatan jenjang pendidikan tidak begitu dibutuhkan.

Variabel jumlah anggota rumah tangga juga mempengaruhi secara signifikan terhadap status kemiskinan suatu rumah tangga di perdesaan. Rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang besar dan rumah tangga bukan miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih sedikit. Sekitar 79,51 persen rumah tangga miskin memiliki jumlah anggota rumah tangga di atas 5 orang bahkan ada yang 10 orang.

Jumlah anggota rumah tangga juga merupakan suatu indikator untuk peningkatan kesejahteraan. Semakin kecil jumlah anggota rumah tangga semakin kecil pula kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok yang harus dikeluarkan. Jumlah pemenuhan kebutuhan yang rendah akan memperbesar kelebihan pendapatan, yang pada akhirnya kelebihan pendapatan ini akan dapat digunakan untuk masa yang akan datang ataupun ditabung.

Variabel jenis pekerjaan kepala rumah tangga (pertanian dan bukan pertanian) juga berpengaruh terhadap kemiskinan suatu rumah tangga secara signifikan. Rumah tangga miskin cenderung bekerja di sektor pertanian, yaitu 84,42 persen, sedang rumah tangga bukan miskin bekerja di luar sektor pertanian, yaitu 61,79 persen. Hal ini menggambarkan ekonomi rumah tangga

miskin sangat bergantung kepada sektor pertanian. Sementara itu penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga sempit dan produktivitas di daerah ini juga rendah akibat sistem pengairan yang belum memadai, sementara disisi lain masih luas lahan yang belum digunakan (lahan tidur).

Variabel kepemilikan rumah tangga akan sumber daya ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap status kemiskinan suatu rumah tangga di perdesaan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber daya ekonomi memiliki resiko lebih besar untuk tergolong menjadi rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki sumber daya ekonomi. Adanya peranan variabel kepemilikan sumber daya ekonomi dalam kaitannya dengan status kemiskinan mengisyaratkan akan perlunya campur tangan pemerintah dalam hal ini lembaga perbankan untuk memberi bantuan modal bagi rumah tangga miskin yang memang masih dicirikan dengan kekurangan modal dalam berusaha. Hubungan yang dibutuhkan dalam bantuan modal atau kredit ringan ini adalah dalam bentuk kemitraan usaha kerja yang erat antara pemberi modal dan penerima bantuan, sehingga dana yang diperoleh dapat disalurkan untuk keperluan yang benar dan dibutuhkan.

Dengan adanya pemberdayaan sosial ekonomi rumah tangga miskin tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan pengurangan beban ekonomi rumah tangga sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin, yang tidak lain peningkatan kesejahteraan ini merupakan salah satu pilar pengembangan wilayah, yang akhirnya pengurangan penduduk miskin itu sendiri dapat tercapai.

KESIMPULAN

- 1). Kondisi sosial ekonomi rumah tangga meliputi, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan kepemilikan sumber

- daya ekonomi rumah tangga secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga di perdesaan.
- 2). Pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap miskin tidaknya suatu rumah tangga di perdesaan.
 - 3). Jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi secara signifikan terhadap status kemiskinan suatu rumah tangga di perdesaan.
 - 4). Jenis pekerjaan kepala rumah tangga (pertanian dan bukan pertanian) mempengaruhi secara signifikan terhadap status kemiskinan (miskin dan bukan miskin) suatu rumah tangga di perdesaan.
 - 5). Kepemilikan rumah tangga akan sumber daya ekonomi mempengaruhi secara signifikan terhadap status kemiskinan suatu rumah tangga di perdesaan.

SARAN

- 1). Perlunya pemberdayaan rumah tangga miskin melalui pemberdayaan terpadu akan sosial ekonomi rumah tangga miskin, meliputi pemberdayaan akan peningkatan pendidikan, penekanan jumlah anggota rumah tangga, peningkatan produktivitas hasil pertanian dan pemberdayaan sumber daya ekonomi rumah tangga.
- 2). Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, perlu ditindak lanjuti pemerintah daerah secara riil.
- 3). Program Keluarga Berencana perlu digalakkan kembali. Sosialisasi Program Keluarga Berencana digencarkan dan jangkauan sosialisasi diperluas, bukan hanya wanita kawin tapi juga terhadap pria kawin serta kepada wanita atau pria yang belum kawin sebagai calon berkeluarga.
- 4). Perlu adanya pembinaan di bidang pengelolaan usaha pertanian baik untuk petani dan nelayan agar peningkatan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan dan pemasaran hasil pertanian dapat dilakukan dengan tepat guna dengan tingkat harga yang memadai sehingga pendapatan rumah tangga tersebut dapat dinaikan. Perlu adanya Program "Perkebunan Inti rakyat".

- 5). Adanya bantuan dana dalam bentuk kredit lunak dengan tingkat bunga yang rendah, dan proses yang sederhana dan tidak memerlukan jaminan aset.

DAFTAR RUJUKAN

- Ala, Bayo, Andre. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapanuli Tengah 2006*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, 2007.
- Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan Kabupaten/Kota 2004*, Badan Pusat Statistik 2005.
- Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Tapanuli Tengah*, Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, 2006.
- H. Hakimil Nasution, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Utara*, Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Utara. 2005.
- Inti Hexa Semesta, PT. *Rencana Detail Pembangunan tapanuli Tengah Dalam Lingkup Kawasan Barat Propinsi Sumatera Utara*. PT Inti Hexa Semesta, 2005.
- Gujarati, 1993, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Nachrowi N. Djalal Dan Hardius Usman. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri Cetakan Pertama*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazir, Moh., 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rajumininropa. 2002. *Pemberdayaan Anak dari Keluarga Miskin, Suatu Studi pada Yayasan Bhakti Nusantara Isafat (YBNI) di Kota Padang*. Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta (Tidak dipublikasikan).
- Ronny Kountur, 2004, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Penerbit PPM, Jakarta.

- Sajogyo. 1977. *Golongan Miskin dan Partisipasi Dalam Pembangunan Desa*. Prisma No. 3 Tahun VI. LP3ES, Jakarta.
- Singgih Santoso, 2006 *Menggunakan SPSS untuk Statistik Parametrik*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. 1997, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Penerbit Tarsirto Bandung.
- Suandi dan Rasud Sihotang, *Faktor Sosio Demografi Dalam Kemiskinan Penduduk di Perdesaan Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi*, Jurnal Penelitian UNIB Vol II No. 3 Juli 2004.
- Sudjana. 2001. *Metoda Statistik*, Edisi Keenam. Penerbit Tarsito, Bandung.
- Sugiyono. 2003. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Cetakan Ketiga. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Tatang Wiranto. *Profil Kemiskinan di Perdesaan*. Info URDI Vol 14.
- Todaro, Mechael P. 2000 *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh/Jilid I. Penerbit Erlangga, Jakarta.

PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Charisma Kuriata Ginting S.
Alumnus S2 MEP SPs USU

Irsad Lubis
Dosen Fakultas Ekonomi USU

Kasyful Mahalli
Dosen Fakultas Ekonomi USU

***Abstract:** Most of study of human development focused on human capital as a factor of economic growth. Meanwhile, specific factors that determine human development itself unexplored systematically. This research aims to analyze influence of household consumption for food and non-food, government expenditure for education, headcount of poverty ratio and economic crisis in Indonesia.*

This study uses data of time series and cross section to each research variable covering 26 provinces in year 1996, 1999, 2002, 2004, 2005 and 2006, according to the availability of data for particular variables. This quantitative analysis applies random effect method to test the hypothesis. This method has an advantage because it able to explain the variance of characteristic of each province behaviors of human development.

The results show quite significance influence among household consumption for food and non-food, government expenditure for education, headcount of poverty ratio and economic crisis to human development in Indonesia. Amount of influence showed by coefficient of regression of independent variables, which are: $-0,9829$ for household consumption for food, $1,2774$ for household consumption for non-food, $26,6791$ for government expenditure for education, -0.214 for rate of poverty. The dummy shows negative influence

***Keywords:** human development, household consumption, poverty and government expenditure*

PENDAHULUAN

Di tengah makin membaiknya kinerja perekonomian, persoalan pengangguran dan kemiskinan masih saja tak terselesaikan. Kebanyakan upaya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengembangkan investasi sektor riil yang pada gilirannya akan membuka akses pada lapangan kerja yang semakin luas. Untuk itu pemerintah bekerja keras membenahi sistem dan aturan agar lebih ringkas, murah dan memiliki kepastian hukum. Tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Angka kemiskinan sampai dengan Juni 2007 berjumlah 37,17 juta jiwa atau 17,75 persen populasi penduduk Indonesia (Kompas, 11/12/2007).

Publikasi UNDP dalam *Human Development Report 2007/2008* menyatakan rasio penduduk Indonesia berpenghasilan maksimal US\$2/hari mencapai 52,4 persen. Fakta ini membuktikan bahwa pertumbuhan

ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat (*trickle down effect*).

Banyak negara – termasuk Indonesia – menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator *gross domestic product/gross national product* (GDP/GNP). Jadi, dalam hal ini, disadari atau tidak disadari, manusia adalah sebagai input dalam proses pertumbuhan, bukan sasaran pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 1990 United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan "Human Development Index" (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Drapper (1990) dalam kata pengantarnya pada *Human Development Report 1990*, munculnya HDI bukan berarti mengenyampingkan peran

GDP, tetapi bagaimana menerjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia.

Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.

Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: *pertama*, banyak negara berkembang – termasuk Indonesia – yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. *Kedua*, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan dibandingkan penduduk

kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlu campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin.

Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Brata (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa distribusi pendapatan adalah determinan paling berperan dalam pembangunan manusia di Indonesia, di samping determinan pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah perempuan. Ranis dan Stewart (2002) menyatakan hal yang sama kecuali adanya tambahan determinan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Brata (2005) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan distribusi pendapatan sebagai determinan-determinan pembangunan manusia di Indonesia. Investasi sebagai penentu pembangunan manusia dipertegas oleh Ranis dan Stewart (2005), di samping determinan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk miskin.

METODE

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode GLS (*Generalized Least Square*)

HASIL

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Perkembangan pembangunan manusia di Indonesia, seperti disebutkan dalam "Indonesia Human Development Report 2004" (UNDP, 2004), sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan menjadi lebih banyak. Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Kebutuhan akan

peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah untuk kedua bidang sosial tersebut makin sangat dibutuhkan sejak krisis ekonomi menerpa.

Sampai dengan tahun 1996 tingkat pembangunan manusia regional cukup mengagumkan, seperti tampak dari berkurangnya kemiskinan dan membaiknya tingkat harapan hidup dan melek huruf (BPS-Bappenas-UNDP, 2001). Namun pencapaian tersebut segera mendapatkan tantangan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Akibat krisis ekonomi, tidak satu propinsi pun yang tidak mengalami penurunan IPM, sehingga IPM 1999 menjadi lebih rendah dari IPM 1996. Tahun 2002 IPM kembali mengalami perbaikan, namun perbaikan tersebut pada umumnya belum mampu menyamai tingkat IPM tahun 1996.

UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi yakni: *low* (IPM kurang dari 50), *lower-medium* (IPM antara 50 dan 65,99), *upper-medium* (IPM antara 66 dan 79,99) dan *high* (IPM 80 ke atas). IPM regional Indonesia termasuk kategori menengah-bawah (*lower-medium*) sampai menengah-atas (*upper-medium*). Tahun 2006, IPM regional tingkat menengah-bawah masih diduduki provinsi Papua, NTB dan NTT. Ketiga provinsi ini termasuk regional dengan rasio penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

Anjloknya IPM Indonesia sebagai akibat dari krisis ekonomi ditentukan oleh faktor daya beli masyarakat yang terpuruk disebabkan membungungnya inflasi. Daya beli masyarakat merupakan salah satu komponen dalam komposit IPM. Komponen lainnya sama sekali tidak terganggu secara signifikan. Bahkan indeks pendidikan yang direpresentasi oleh *adult literacy rate* dan *mean years schooling* menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Satu hal yang sering kali dikaitkan dengan pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi banyak mengamati sejauh mana hubungan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Demikian pula halnya dengan UNDP yang menyatakan bahwa hingga akhir tahun 1990-an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan PDB akan meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Perkembangan IPM regional dan pendapatan regional domestik bruto (PDRB) relatif tidak seirama. Perkembangan PDRB yang tinggi tidak selalu diikuti oleh perkembangan IPM yang tinggi pula. Sebaliknya, pertumbuhan PDRB yang rendah belum tentu diikuti oleh perkembangan IPM yang rendah pula. Provinsi DIY memiliki prestasi terbaik dalam menerjemahkan pertumbuhan ekonomi ke dalam pembangunan manusia. DIY urutan 17 pada PDRB per kapita tetapi mencapai urutan 4 pada IPM. Prestasi ini tetap bertahan sejak tahun 2002 (Tabel 1). Keberhasilan ini tidak terlepas predikat DIY sebagai provinsi dengan derajat kesehatan kedua terbaik nasional setelah DKI (Dinkes DIY, 2005). Hal ini didukung oleh *political will* pemerintah provinsi di mana anggaran untuk kesehatan mencapai 93 persen APBD Kabupaten/Kota (Dinkes DIY, 2005). DIY mampu dan berhasil menerjemahkan pertumbuhan ekonomi ke dalam pembangunan manusia. Dengan kata lain, setiap sen pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati sebanyak mungkin penduduk.

Provinsi Papua dengan PDRB menempati urutan 4, tetapi hanya menempati urutan paling rendah, 26, pada IPM (Tabel 1). Ini adalah bukti bahwa sumber daya alam yang begitu besar yang dimiliki Provinsi Papua tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyatnya. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa tahun 2006 terdapat peningkatan penanaman modal asing (PMA) sebesar 786,86 persen atau menjadi US\$ 121,5 juta (dibandingkan US\$ 13,7 juta pada tahun 2005). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut lebih dinikmati pemerintah pusat dan investor asing dari pada penduduk setempat.

Setiap tahun sejak tahun 1990, UNDP telah menerbitkan Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) yang berisi perkembangan IPM negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam laporan terakhirnya, posisi Indonesia meningkat satu tingkat dari urutan 107 pada tahun 2004 menjadi urutan 106 pada tahun 2005. Prestasi

ini terutama disumbang oleh peningkatan pencapaian indikator umur harapan hidup yang menduduki urutan 89, di mana tahun sebelumnya berada pada urutan 108.

Tabel 1. Perkembangan PDRB dan IPM Tahun 2006

Rank (2002)	Provinsi	PDRB per kapita	PDRB rank	IPM	IPM rank	PDRB rank minus IPM rank
1 (1)	DIY	5.174.604,79	17	73,7	4	13
2 (3)	Sulut	6.261.864,54	14	74,4	2	12
3 (5)	Bengkulu	4.214.593,64	22	71,3	10	12
4 (4)	Jambi	4.980.313,79	18	71,3	9	9
5 (2)	Maluku	2.706.329,71	24	69,7	15	9
6 (6)	Jateng	4.682.581,73	20	70,3	13	7
7 (7)	Lampung	4.277.425,73	21	69,4	17	4
8 (10)	Sultra	2.442.350,23	25	67,8	21	4
9 (9)	Sumbar	6.681.547,98	11	71,6	8	3
10 (15)	Sumut	7.381.670,74	9	72,5	7	2
11 (12)	NTT	2.357.261,37	26	64,8	24	2
12 (11)	Kalteng	7.665.434,49	6	73,4	5	1
13 (13)	DKI	34.887.057,60	1	76,3	1	0
14 (8)	Riau	17.503.036,29	3	73,8	3	0
15 (14)	Jabar	6.495.458,40	12	70,3	12	0
16 (19)	Bali	6.464.848,92	13	70,1	14	-1
17 (16)	Sulsel	4.868.280,36	19	68,8	20	-1
18 (25)	NTB	3.647.098,17	23	63,0	25	-2
19 (21)	Sulteng	5.239.289,74	16	68,8	19	-3
20 (18)	Kaltim	32.892.611,88	2	73,3	6	-4
21 (17)	Sumsel	7.567.551,60	7	71,1	11	-4
22 (24)	Kalbar	6.014.624,48	15	67,1	23	-8
23 (20)	Jatim	7.412.421,71	8	69,2	18	-10
24 (22)	NAD	9.123.780,65	5	69,4	16	-11
25 (23)	Kalsel	7.255.293,10	10	67,7	22	-12
26 (26)	Papua	9.318.288,79	4	62,8	26	-22

Sumber: BPS, UNDP, beberapa publikasi

Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga untuk Makanan dan Bukan Makanan

Pemahaman tentang konsumsi rumah tangga di sini bukanlah secara teori makroekonomi, tetapi lebih pada pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pembangunan manusia. Diasumsikan bahwa rumah tangga melakukan aktifitas konsumsi pada dua jenis barang/jasa, yakni: makanan (*food*) dan bukan makanan (*non food*). Eksistensi konsumsi rumah tangga yang mencapai 52,3 persen dari PDB (BPS, 2006) diyakini berperan penting dalam pembangunan manusia.

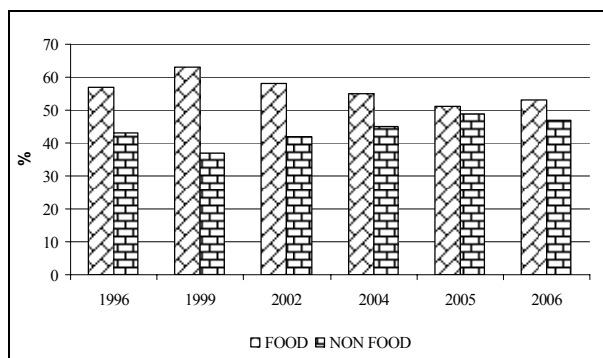
Biaya yang dikeluarkan untuk kelompok makanan dihitung menggunakan *consumption approach*, artinya yang sudah benar-benar dikonsumsi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk kelompok bukan makanan dihitung menggunakan *delivery approach*, artinya konsumsi/pengeluaran barang-barang yang sudah dibeli/diperoleh/digunakan oleh rumah tangga selama masa referensi (BPS, 2005).

Mencermati perkembangan proporsi konsumsi makanan dan non makanan di

Indonesia (Gambar 1), terdapat tendensi proporsi konsumsi makanan menurun disubstitusi oleh konsumsi non makanan. Namun demikian, rasio konsumsi makanan masih lebih tinggi dari konsumsi non makanan. Proporsi konsumsi makanan tertinggi terjadi pada tahun 1996, sedangkan non makanan pada tahun 2005. Yuliarini (2008) menemukan bahwa pola konsumsi masyarakat ditentukan oleh tingkat penghasilan atau kemapanan. Konsumsi masyarakat kurang mapan didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan masyarakat mapan lebih banyak berkonsumsi pada kebutuhan sekunder dan tersier. Makanan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Gambar 1 menunjukkan masyarakat Indonesia bergerak menuju kemapanan karena proporsi konsumsi makanan dari tahun ke tahun semakin berkurang.

Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan masyarakat adalah struktur pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran makanan yang tinggi tergolong rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah dibandingkan dengan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran makanan yang rendah. Hal ini mendukung Hukum Engel (*Engel's law*) yang ditemukan Engel (1857). Engel mengamati enam jenis pengeluaran rumah tangga, yakni: makanan, pakaian, perumahan, kendaraan/transportasi, kesehatan/pendidikan/rekreasi dan tabungan. Hukum Engel mengatakan: pada saat pendapatan meningkat, proporsi pengeluaran untuk makanan turun meskipun nilai aktualnya meningkat, dengan asumsi selera tetap. Dengan perkataan lain, elastisitas pendapatan (*income elasticity*) terhadap permintaan makanan lebih kecil dari 1.

Jika *Engel's law* diterapkan terhadap Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa provinsi yang tingkat pendapatannya tinggi akan lebih rendah proporsi konsumsi makanannya dibandingkan dengan provinsi yang berpendapatan rendah. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa NTT dengan PDRB/kapita Rp 2,36 juta adalah provinsi tertinggi proporsi konsumsi makanannya. Sementara proporsi konsumsi makanan paling rendah berada pada Provinsi Kaltim dengan PDRB/kapita Rp 32,89 juta.



Gambar 1. Perkembangan Proporsi Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan di Indonesia Periode 1996-2006

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan

Mengapa pemerintah perlu peduli terhadap pelayanan publik pendidikan dan kesehatan? Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk. 2001).

Kondisi umum pendidikan di Indonesia ditandai oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM); sekitar 58 persen dari tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang, hanya 4 persen yang berpendidikan tinggi. Prospek peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang pun terlihat suram. Rata-rata angka partisipasi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi masih relatif rendah yakni 56 persen untuk SLTP, 32 persen untuk SLTA dan 12 persen untuk perguruan tinggi (Susenas, 2002).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain. Pelaksanaan APBN-P 2006, belanja pemerintah pusat untuk pendidikan hanya 9,3 persen.

Banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan. Rata-rata anggaran

belanja rutin pada APBN sebesar 15 persen, pembayaran cicilan hutang 20 persen, 30 persen ditransfer ke daerah-daerah, dan subsidi 5 persen yang sebagian besar untuk listrik dan BBM. Hanya tertinggal 30 persen untuk anggaran pembangunan. Apakah mungkin dialokasikan 20 persen untuk sektor pendidikan saja, padahal di luar pendidikan, ada sektor lain yang erat kaitannya dengan pembangunan manusia, misalnya sektor kesehatan?

Dari tahun 1996 hingga 2006 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan bertumbuh signifikan, rata-rata 250 persen per tahun, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 486 persen. Lonjakan yang terjadi pada tahun 2005 disebabkan oleh munculnya UU No. 23 Tahun 2003 yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen.

Tahun 2005 pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebesar Rp 46,3 ribu/kapita/tahun. Angka ini relatif besar mengingat per kapita di sini mencakup seluruh penduduk (219,8 juta jiwa), tidak khusus usia sekolah dasar dan lanjutan pertama saja (usia 7-15 tahun, wajib belajar 9 tahun). Tahun 2005 jumlah penduduk usia 7-15 tahun adalah 37,9 juta jiwa (Bappenas, 2005). Jadi, jika dikonversi menurut penduduk usia 7-15 tahun saja, maka subsidi pemerintah untuk sektor pendidikan menjadi sebesar Rp 268 ribu/kapita/tahun. Jumlah ini tentu saja tidak memadai.

Badan PBB untuk Urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) meletakkan pendidikan Indonesia turun dari peringkat ke-58 menjadi ke-62 dari 130 negara. Bandingkan Malaysia di peringkat ke-56 dan Brunei di peringkat ke-43 (Diknas, 2007).

Menurut hasil survey The Political & Economic Risk Country (PERC) tahun 2001, disebutkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia yang diteliti (Republika, 24/01/2003). Dari penelitian The International Education Achievement (IEA) tahun 2000, diketahui bahwa kemampuan membaca siswa SD di Indonesia berada di urutan ke-38 dari 39 negara dan terendah di antara negara-negara ASEAN (Republika, 24/01/2003).

Perkembangan Rasio Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi masalah yang terus-menerus menjadi agenda dan sasaran kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah. Namun sejarah mencatat bahwa pemerintah sering kali gagal bahkan memperburuk keadaan. Sebagai contoh, pemerintah pada masa orde baru memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan mengandalkan “*trickle down effect*” sebagai strategi mencapai pemerataan. Pada akhirnya waktu juga yang menjawab bahwa strategi tersebut tidak efektif.

Perkembangan rasio penduduk miskin (RPM) sangat dipengaruhi oleh kondusifitas perekonomian. Sebab, kemiskinan berhubungan langsung dengan pendapatan, dan pendapatan bersumber dari aktifitas perekonomian. Oleh karena itu, manakala krisis ekonomi melanda Indonesia, jumlah penduduk miskin pun bertambah. Buktinya, dari tahun 1996 ke tahun 1999 rasio penduduk miskin meningkat 34 persen. Kemudian pada tahun 2002 dan 2005 mengalami kemajuan, bahkan tahun 2005 rasio penduduk miskin telah lebih rendah dari masa sebelum krisis. Tetapi pada tahun 2006 RPM kembali meningkat menjadi 17,75 persen, lebih tinggi dari kondisi sebelum krisis, 17,47 persen. Penyebabnya adalah meningkatnya laju inflasi pada tahun 2006 akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada Oktober 2005.

PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Estimasi Metode GLS

Dependent Variable: PMI	Independent Variable					
	C	PRM	PRB	PPD	RPM	D
Coefficient	71,8304	-0,9829	1,2774	26,6791	-0,2140	-0,7447
t-Stat	75,63**	-4,24**	4,70**	7,18**	-7,28**	-2,27*
R ²	0,88					
F-Stat	224,5146					

**Signifikan pada tingkat α 1%

*Signifikan pada tingkat α 5%

Koefisien regresi PRM (pengeluaran rumah tangga untuk makanan) sama dengan -0,9829. Ini berarti jika PRM meningkat 1 juta rupiah, maka IPM akan turun 0,9829 satuan. Sebaliknya, jika PRM turun 1 juta rupiah maka IPM akan meningkat 0,9829 satuan. Pengaruh variabel PRM ini relatif tinggi dan sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 99,99 persen. Terbukti bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Pola konsumsi masyarakat Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah yang benar, yang sesuai dengan Hukum Engel, bahwa semakin sejahtera suatu rumah tangga/masyarakat/bangsa maka semakin kecil proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan. Perkembangan konsumsi rumah tangga untuk makanan menunjukkan tren menurun, sehingga mendukung pembangunan manusia.

Koefisien regresi PRB (pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan) sama dengan 1,2774. Artinya, bilamana terjadi peningkatan PRB sebesar 1 juta rupiah maka IPM akan meningkat 1,2774 satuan. Demikian pula sebaliknya, jika PRB turun 1 juta rupiah maka IPM akan turun sebesar 1,2774 satuan. Pengaruh PRB terhadap IPM ini signifikan pada tingkat kepercayaan 99,99 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Perkembangan proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat untuk bukan makanan menunjukkan tren meningkat. Masyarakat sudah menyadari akan pentingnya mengedepankan pengeluaran konsumsi bukan makanan yang *notabene* termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan karena pendidikan dan kesehatan yang baik membuka peluang lebih besar bagi pendapatan yang lebih baik pula.

Koefisien regresi variabel PPD (pengeluaran pemerintah untuk pendidikan) adalah 26,6791. Ini adalah nilai koefisien terbesar dari antara variabel-variabel bebas dalam model. Koefisien PPD sama dengan 26,6791 berarti bilamana PPD meningkat 1 juta rupiah, maka IPM akan meningkat pula sebesar 26,6791 satuan. Pengaruh PPD terhadap IPM ini signifikan pada tingkat kepercayaan 99,99 persen. Variabel PPD berpengaruh positif terhadap perkembangan pembangunan manusia.

Dengan hasil estimasi sedemikian, makin jelas bahwa pembangunan manusia di Indonesia sangat ditentukan oleh pemerintah. Nilai koefisien PPD yang relatif besar menunjukkan bahwa pengaruh PPD terhadap pembangunan manusia adalah besar. Diharapkan pemerintah berani untuk segera merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen karena hasil estimasi ini menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah

untuk pendidikan terhadap pembangunan manusia adalah empat kali lipat lebih. Begitu besarnya pengaruh PPD ini, masalah pembangunan manusia akan dapat terselesaikan hanya dengan melakukan *pumping up* terhadap variabel ini.

Koefisien regresi variabel RPM (rasio penduduk miskin) adalah -0,2140. Berarti tiap peningkatan RPM sebesar 100 persen maka IPM akan turun 21,40 satuan. Sebaliknya, jika RPM turun sebesar 100 persen maka IPM akan meningkat 21,40 satuan. Pengaruh variabel RPM terhadap IPM signifikan pada tingkat kepercayaan 99,99 persen. Benar adanya bahwa semakin tinggi populasi penduduk miskin akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit indeks pembangunan manusia.

Hasil estimasi variabel *dummy* (D) menunjukkan pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 97,57 persen. Koefisien regresinya bertanda negatif menunjukkan bahwa kondisi krisis ekonomi berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia. Penjelasan, pada masa krisis ekonomi laju inflasi meningkat tajam (pada saat yang sama tingkat pendapatan tetap atau bahkan menurun), akibatnya daya beli masyarakat menurun, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat menurun. Jumlah penduduk miskin bertambah, pengeluaran konsumsi rumah tangga diutamakan untuk membeli makanan, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan berkurang, dan pada akhirnya masyarakat menjadi bodoh dan tingkat kematian tinggi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan nilai koefisien determinasi pada hasil estimasi sebesar 0,88, maka variabel pembangunan manusia di Indonesia mampu dijelaskan oleh variabel-variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan, rasio penduduk miskin, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan *dummy* (proksi krisis ekonomi) sebesar 88 persen. Selebihnya yang 12 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model yang digunakan.

2. Variabel-variabel yang digunakan menjelaskan pembangunan manusia menunjukkan arah pengaruh masing-masing yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan berpengaruh positif, rasio penduduk miskin berpengaruh negatif, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.
3. Memperbandingkan besarnya nilai koefisien variabel-variabel yang menjelaskan pembangunan manusia, maka variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah yang terbesar, diikuti berturut-turut oleh variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan dan terkecil variabel rasio penduduk miskin.
4. Krisis ekonomi berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia secara signifikan.

SARAN

1. Sudah saatnya pembangunan tidak lagi diletakkan pada kekuatan sumber daya alam (*natural resources based*), tetapi pada kekuatan sumber daya manusia (*human resource based*). Caranya adalah dengan meletakkan prioritas pembangunan pada pembangunan manusia, karena pada akhirnya pembangunan manusia yang berhasil akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Diharapkan pemerintah berani mewujudkan anggaran pendidikan 20 persen sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sangat besar bagi pembangunan manusia.
3. Agar semakin banyak lagi penelitian-penelitian yang digelar yang bertema pembangunan manusia, maka semakin banyak pula solusi yang dapat diperoleh untuk meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia. Diharapkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki lembaga/badan demografi yang mengkhususkan perhatiannya pada pembangunan manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- BPS, 1998. *PDRB Propinsi-Propinsi Menurut Penggunaan 1994-1997*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- _____, 2002. *PRDB Propinsi-Propinsi Menurut Penggunaan 1998-2001*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- _____, 2005. *PDRB Propinsi-Propinsi Menurut Penggunaan 2000-2004*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- _____, 2006. *PDRB Propinsi-Propinsi Menurut Penggunaan 2000-2004*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- _____, 2008. *Trends of the Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- BPS-Bappenas-UNDP, 2001. *Indonesia Human Development Report 2001. Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
- _____, 2004. *National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Depdiknas, 2007. *Pembangunan Manusia Indonesia*. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi DIY. *Diakses dari: http://lpmpjogja.diknas.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=197*, 7/18/2008 12:39 PM.
- Dinas Kesehatan Propinsi D.I.Y., 2005. *Profil Kesehatan Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2005*. Yogyakarta: Dinkes Prop. DIY.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending? World Bank Working Paper No. 2739*. Washington D.C.: World Bank. *Diakses dari: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=634451&rec=1&srcabs=447165*, 6/22/2007 2:41 PM.
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2002. *Economic Growth and Human Development in Latin America. Cepal No. 78. The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)*. *Diakses dari: <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/19952/lcg2187i-Ranis.pdf>* 12/11/2007 4:57 PM.
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2005. *Dynamic Links between the Economy and Human Development. DESA Working Paper No. 8*. Washington D.C.: World Bank.
- UNDP, 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.
- _____, 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.
- _____, 2007. *Human Development Report 2007/2008*. New York: Palgrave Macmillan.
- Yuliarmi, Ni Nyoman, 2008. *Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali*. *Buletin Studi Ekonomi* Volume 13 Nomor 2 Tahun 2008.

ANALISIS PENGARUH NILAI TUKAR RIIL TERHADAP *TRADE FLOWS* PROVINSI SUMATERA UTARA (KONDISI MARSHALL – LERNER DAN FENOMENA J-CURVE)

Murianda

e-mail: murianda_co86@yahoo.com

Abstract: *The paper is testing the Marshall-Lerner Condition and the J-curve phenomenon on the North Sumatera trade. We apply the panel regression model and analyze the impact of the real depreciation of Rupiah on the trade performance, both in the short run and the long run. The study indicates the insignificant of the Rupiah real depreciation to boost the export performance in the short run. When the time horizon is long enough, the increase of the export caused by depreciation, will offset the increase of the import, hence in the long run the real depreciation of Rupiah may significantly increase the trade performance, but still in small number. The result of the study show depreciation of Rupiah real exchange rate has boosted current account in the long run, where the elasticity of real effective exchange rate was 2,86 greater than 1.*

The implication is clear for the policy maker; if the aim of the policy is to boost the trade performance, then the exchange rate policy should not be an alternative, rather using policy to increase the productivity, efficiency, product quality management, loose tax policy and the creation of the bussiness climate. This includes the industrial re-structuring to lower the import dependences

Keywords: *J-Curve, Marshall-Lerner, trade and exchange rate*

PENDAHULUAN

Sebagai suatu wilayah yang menganut sistem ekonomi terbuka Sumatera Utara juga melakukan perdagangan luar negeri dengan berbagai negara di dunia. Pada periode 2002 nilai ekspor Sumatera Utara turun sebesar 3 persen, jika pada tahun sebelumnya ekspor Sumatera Utara adalah sebesar US\$ 2.294.796 pada tahun 2002 turun menjadi US\$ 1.867.435, kemudian pada tahun 2003 naik lagi menjadi US\$2.891.996 kemudian pada tahun 2004 terus mengalami kenaikan sehingga mencapai US\$ 4.239.409. Fenomena Penurunan Ekspor Sumatera Utara pada tahun 2002 terus menimbulkan banyak spekulasi dikalangan masyarakat awam maupun pada akademisi. Numun, banyak peneliti menyatakan bahwa penurunan ekspor Sumatera Utara pada tahun 2002

disebabkan oleh apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terjadi sejalan tahun 2002.

Kondisi yang dibutuhkan dari devaluasi untuk memperbaiki kinerja *trade balance* (CA) disebut Kondisi Marshall-Lerner. Kondisi ini sering menjadi debat kebijakan (*policy debate*) dan telah dijadikan sebagai *acuan hukum* yang secara luas digunakan dalam model ekonomi terbuka seperti dalam Model Mundell-Fleming (Caves at.al, 1996) dan model keseimbangan internal-eksternal (Miller dan Williamson 1991) jadi pertanyaan apakah kondisi Marshall-Lerner terpenuhi adalah sangat penting, sehingga Penulis mencoba menggunakan model untuk menganalisis ekonomi Sumatera Utara.

Tabel 1. Perkembangan Neraca Perdagangan Sumatera Utara Tahun 2000-2004 (Ribuan US\$)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
2000	2.437.764	775.287	1.662.477
2001	2.294.796	860.758	1.434.038
2002	1.567.435	819.298	748.137
2003	2.687.877	679.811	2.008.066
2004	4.239.409	953.359	3.286.050

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Utara

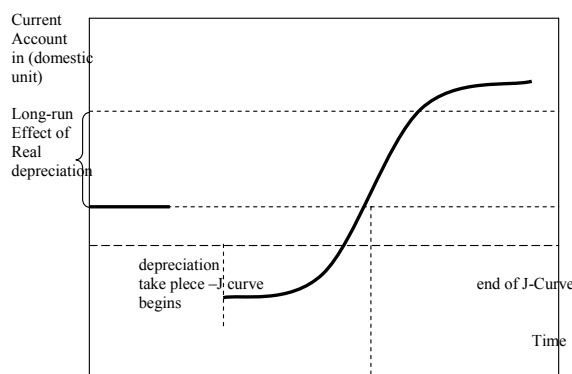
Marshall (1842-1924) dan Lerner (1903-1982) menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar riil akan meningkatkan kinerja *current account* apabila volume ekspor dan volume impor elastis terhadap perubahan nilai tukar riil. Dampak perubahan nilai tukar riil terhadap *current account* dibagi kedalam *volume effect* dan *value effect*.

Volume effect adalah dampak perubahan unit output ekspor dan impor akibat dari perubahan nilai tukar riil. Mereka berargumen bahwa *volume effect* adalah positif karena elastisitas ekspor adalah positif (perubahan permintaan volume ekspor terhadap perubahan nilai tukar riil positif > 0). Sementara *value effect* adalah kenaikan nilai impor atas harga domestik akibat dari perubahan nilai tukar riil. Sehingga perubahan *current account* secara netto dapat menjadi positif atau negatif tergantung pada elastisitas ekspor dan impor. Dengan asumsi *current account balance*, depresiasi nilai tukar riil akan mengakibatkan *current account* menjadi surplus apabila jumlah dari elastisitas ekspor dan impor lebih besar dari 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka disebut *Marshall-Lerner Condition* terpenuhi.

Dengan depresiasi nilai tukar riil maka harga produk dipasar di pasar global menjadi lebih murah sehingga daya saing meningkat. Oleh karena itu depresiasi akan meningkatkan permintaan ekspor sehingga EX_q akan bernilai positif ($EX_q > 0$). Sementara itu EX^*_q bernilai negatif ($EX^*_q < 0$) karena depresiasi nilai tukar riil akan meningkatkan barang impor menjadi lebih mahal sehingga barang domestik menjadi relatif lebih murah sehingga meningkatkan daya saing di pasar domestik, hal ini akan menurunkan impor dari luar negeri. Berdasarkan persamaan di atas, selanjutnya dapat dianalisa perubahan q terhadap *current account* (*trade balance*) dengan menggunakan *Marshall-Lerner Condition*.

Dalam jangka pendek, terjadinya depresiasi nilai tukar riil akan meningkatkan nilai impor serta terjadinya peningkatan dalam volume ekspor sejalan dengan semakin kompetitifnya harga ekspor, sehingga akan meningkatkan kinerja *trade balance*. Oleh karena itu, dampak depresiasi nilai tukar riil terhadap *trade balance* terjadi melalui *price effect* (*value effect*) dan *volume effect*. *Price effect* menyebabkan penurunan

kinerja *trade balance*. Sedangkan *volume effect* akan meningkatkan kinerja *trade balance*. Pola pergerakan dampak depresiasi nilai tukar domestik riil terhadap *trade balance* ini mirip huruf J sehingga dikenal dengan J-Curve.



Gambar 1. J-Curve

Sumber: Paul L. Krugman and Maurice Obstfeld, 1994, hal. 465.

Studi empiris mengenai perilaku ekspor banyak dilakukan dengan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah dengan lebih memfokuskan pada sisi permintaan ekspor. Dalam hal ini penawaran ekspor diasumsikan bersifat elastis (*supply elasticities are perfectly elastic*).

Menurut model standar permintaan ekspor, maka permintaan ekspor akan dipengaruhi oleh berbagai variabel diantaranya harga dari barang itu sendiri, harga barang sejenis dari pesaing, dan pendapatan negara yang dituju (negara importir). Namun demikian tingkat harga barang itu sendiri juga dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti tingkat produktifitas tenaga kerja, produktifitas modal, dan biaya input. Jika permintaan akan barang ekspor tersebut sangat responsive terhadap perubahan harga, maka harga barang sejenis dari pesaing juga kemungkinan akan berpengaruh secara signifikan. Sehingga menurut model standar, fungsi permintaan ekspor dapat ditulis sebagai berikut:

$$X^d_{it} = f(P^x_{it}, Y_{if}, P^c_{it})$$

Dimana X^d_{it} = volume permintaan ekspor i pada periode t , P^x_{it} = harga barang ekspor i pada periode t , Y_{if} = pendapatan riil

tujuan ekspor utama barang i , P^{c}_{it} = harga barang i dari negara pesaing pada periode t .

Karena adanya keterbatasan data yang tersedia maka harga produk sejenis dari negara pesaing (P^{c}_{it}) tidak dapat dimasukkan dalam estimasi. Sebagai proksi, studi ini menggunakan variabel REER (Real Effective Exchange Rate). Disadari bahwa variabel REER tidak secara total dapat mengganti variabel harga sejenis dari negara pesaing karena perhitungan REER menggunakan CPI sehingga memberikan gambaran umum tingkat daya saing eksternal. Sehingga fungsi permintaan ekspor menjadi:

$$X^d_{it} = f(P^x_{it}, Y_{if}, REER_t)$$

REER digunakan dalam persamaan ekspor karena REER merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui daya saing produk ekspor dengan mitra dagangnya. REER secara konvensional diukur sebagai berikut:

$$REER = \prod_{i=1}^n [(e/e_i)(P/P_i)]^{wi}$$

Dimana:

- e = Nilai tukar rupiah terhadap U.S dollar
- e_i = Nilai tukar negara i terhadap U.S dollar
- P = Consumer Price Index (CPI) Indonesia
- P_i = Consumer Price Index (CPI) Negara i
- w_i = Indek timbangan mata uang luar negeri/index mata uang negara i

Sejalan dengan fungsi standar permintaan ekspor, maka fungsi permintaan impor adalah sebagai berikut:

$$M_{it} = f(P^m_{it}, Y_d, REER)$$

Dimana:

- M_{it-m} = volume impor i pada periode t ,
- P^m_{it} = harga barang impor i pada periode t ,
- BRER = Bilateral Real Exchange Rate,
- Y_d = PDRB Riil Domestik.

Permintaan barang impor akan dipengaruhi oleh tingkat harga barang impor, REER, dan PDRB riil domestik, makin tinggi tingkat harga barang maka permintaan akan barang impor akan semakin menurun sehingga dihipotesakan bahwa hubungan

antara barang impor adalah negatif. Sedangkan hubungan antara permintaan dengan PDRB Riil domestik adalah positif. Makin tinggi PDRB Riil domestik maka permintaan impor semakin meningkat. Sementara kontras dengan ekspor maka hubungan REER dengan permintaan impor adalah positif. REER meningkat mengindikasikan nilai tukar mata uang domestik nominal terapresiasi sehingga nilai tukar rupiah mengalami peningkatan daya beli, akibatnya daya beli rupiah meningkat. Sehingga harga barang impor menjadi lebih murah diukur dengan mata uang domestik dan daya saing barang lokal menurun sehingga permintaan akan barang impor meningkat. Oleh karena itu, dihipotesakan bahwa hubungan REER dengan permintaan barang impor adalah positif.

METODE

Metode Penelitian

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled time series, cross-section data*). Keuntungan dari menggunakan data panel antara lain sebagai berikut:

- a. Estimasi dengan data panel dapat menunjukkan secara eksplisit setiap *heterogenitas* kedalam perhitungan menurut keunikan dari variabel individual.
- b. Data panel dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan kurangnya data historis yang diperlukan.
- c. Jika dibandingkan dengan menggunakan *cross-section estimation*, maka data panel lebih unggul karena data panel menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara *time series* dan menggunakan prosedur berbasis *cross-section*.

Analisis regresi data panel yang akan dilakukan dalam studi ini adalah regresi tertimbang lintas kelompok (*cross-section weighted regression*) dengan *fixed effect intercept estimator*. Penggunaan regresi tertimbang dipilih karena residual bersifat heteroskedastisitas dan tidak berkorelasi *contemporaneous* secara lintas kelompok industri. Sementara itu, estimator *fixed effect* memungkinkan parameter intercept berbeda antar kelompok barang, sehingga dengan menggunakan *fixed effect* maka *intercept* bervariasi disetiap kelompok barang tetapi

tetap mengasumsikan bahwa *koefisien slope* adalah konstan antar unit *cross section*:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana *subcrip i* pada intercept menunjukkan bahwa intercept dari setiap *unit cross section* mungkin berbeda. Perbedaan ini kemungkinan menunjukkan ciri spesifik masing-masing unit *cross section*. Namun demikian, meskipun *intercept* mungkin berbeda untuk setiap kelompok barang tetapi tidak bervariasi terhadap waktu, dan dalam model ini menggunakan estimator *Generalized Least Square* (GLS).

Data

Data ekspor dan impor yang digunakan adalah ekspor dan impor non-migas yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam ekspor dan impor Sumatera Utara. Pencatatan transaksi ekspor menggunakan syarat FOB sedangkan transaksi impor menggunakan C&F. Pengolahan dokumen PEB dan PIB dilakukan secara kronologis berdasarkan bulan dan tahun transaksi yang tercantum dalam dokumen yang bersangkutan. Metode pengolahan data ini disebut dengan sistem *open date*. Dengan demikian, data masing-masing periode laporan akan mengalami perubahan sepanjang dokumen yang bersangkutan masih diterima.

Klasifikasi barang dalam statistik ekspor dan impor menggunakan *The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* yang berlaku. Sedangkan volume barang ekspor dan impor dicatat dalam berat bruto.

Data ekspor mencakup 21 kelompok barang dengan klasifikasi *Standard International Trade Classification (SITC)* 2 digit yang berlaku. Untuk impor hampir semua barang impor telah dapat dicakup dalam penelitian ini baik untuk barang-barang konsumsi, bahan baku maupun barang modal. Sedangkan untuk data harga barang ekspor dan impor menurut klasifikasi barang, studi ini menggunakan pendekatan bahwa harga merupakan hasil bagi dari *nilai* dengan *volume*. Pendekatan ini digunakan karena keterbatasan data yang tersedia, sehingga harga dirumuskan sebagai berikut:

Harga Barang Ekspor i = Nilai Ekspor Barang i / Volume Barang Ekspor i

Data digunakan dalam basis bulanan mulai dari januari 2002 sampai dengan juli 2007 (67 bulan). Periode sampel dimulai dari 2002, karena adanya perbedaan sistem pencatatan dan *coverage* (cakupan) dengan periode sebelumnya. Dapat diinformasikan bahwa pada tahun 2004 telah digunakan sistem pencatatan baru dengan menggunakan sistem *on line* sedangkan pada periode sebelumnya menggunakan sistem pencatatan *off line*. Disamping itu ada juga perbedaan *coverage* dimana tahun 2004 menggunakan *open file* 2 bulan dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan *open file* 3 bulan. Penyesuaian dengan sistem baru ini telah dilakukan untuk data mulai tahun 2002, sedangkan untuk periode sebelumnya belum dilakukan penyesuaian secara formal. Oleh karena itu, studi ini menggunakan periode sampel mulai januari 2002. Sementara itu, data PDB tersedia dalam basis triwulanan, untuk merubah data menjadi bulanan maka digunakan *interpolasi*.

HASIL

Perkembangan Ekspor Impor Sumatera Utara

Selama periode 2002-2007 pertumbuhan ekspor impor Sumatera Utara mengalami fluktuasi, namun neraca perdagangan cenderung mengarah pada peningkatan. Jika pada tahun 2001 ekspor Sumatera Utara adalah sebesar 2,29 milyar US\$ dan impor sebesar 860.758 juta US\$, pada tahun 2002 mengalami penurunan. Ekspor Sumatera Utara pada tahun 2002 turun hingga mencapai 1.52 milyar US\$, dan impor menjadi 819.298 juta US\$.

Pada tahun 2003, ekspor Sumatera Utara yang bernilai 2,69 milyar US\$, mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,06 persen. Dan impor Sumatera Utara pada tahun yang sama, mengalami pertumbuhan negatif yaitu -17,03 persen, dan hanya mencapai 679,8 juta US\$. Sama halnya dengan ekspor dan impor, neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara yang sebesar 2,0 milyar US\$, juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,12 persen.

Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada sektor Industri (-12,53 persen), dan sektor Pertambangan dan penggalian (-29,46 persen), sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah

sektor Pertanian sebesar (14,38 persen), dan Lainnya (86,36 persen).

Sebagian besar ekspor Sumatera Utara pada tahun 2003, didominasi oleh ekspor sektor Industri, sebesar 73,93 persen dari total ekspor Sumatera Utara. Ekspor sektor Pertanian mengambil porsi 25,56 persen, ekspor sektor Pertambangan dan Penggalian 0,51 persen, sedangkan ekspor sektor minyak dan gas bumi tidak memiliki peran sama sekali.

Dilihat dari sisi impor, pada tahun 2003 impor Sumatera Utara mengalami pertumbuhan negatif. Impor Barang Modal (-48,35 persen), impor barang Konsumsi (-20,16 persen), sedangkan Bahan Baku Penolong (naik 9,18 persen). Porsi terbesar impor Sumatera Utara tahun 2003 adalah impor Bahan Baku Penolong 54,97 persen. Impor Barang Konsumsi 24,89 persen, dan Barang Modal 20,14 persen.

Pada tahun 2003, impor dari negara asal mengalami pertumbuhan negatif. Impor dari ASEAN memiliki pertumbuhan negatif terbesar yaitu -53,84 persen. Impor dari benua lainnya yang juga mengalami pertumbuhan negatif adalah, Asia Lainnya (-13,81 persen), Uni Eropa (-12,07 persen), sedangkan impor dari negara asal yang mengalami pertumbuhan positif adalah Timur Tengah (57,22 persen), Afrika (38,17 persen), Oseania (37,44 persen), Eropa Lainnya (34,35 persen), dan Amerika Latin (10,02 persen). Sebanyak 37,41 persen impor Sumatera Utara tahun 2003 berasal dari negara Asia Lainnya, dan impor dari negara-negara ASEAN sebesar 17,83 persen. Selebihnya, berasal dari Oseania (14,28 persen), Uni Eropa (9,49 persen), Amerika Utara (9,39 persen), Eropa lainnya (4,43 persen), Amerika Latin (3,60 persen), Timur Tengah (2,40 persen), dan Afrika yang paling kecil (1,15 persen).

Nilai ekspor Sumatera Utara sampai Oktober 2005 meningkat sebesar 9,05 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2004, yakni dari US\$. 3.483 juta menjadi US\$. 3.798 juta. Ekspor produk sektor pertanian meningkat 16,61 persen, sedangkan produk industri yang merupakan penyumbang terbesar ekspor Sumatera Utara meningkat 7,98 persen.

Berdasarkan kelompok SITC 1 digit, komposisi terbesar pada ekspor Sumatera

Utara sampai Oktober 2005 adalah kelompok minyak dan lemak nabati-hewani sebesar 38,84 persen (US\$. 1.475 juta) antara lain berupa minyak sawit dan CPO. Kemudian diikuti oleh kelompok bahan baku sebesar 20,92 persen (US\$. 795 juta). Ekspor Sumatera Utara sebagian besar ditujukan ke kawasan Asia Lainnya dan Uni Eropa.

Sampai Oktober 2005, ekspor Sumatera Utara yang ditujukan ke kawasan Asia Lainnya mencapai US\$. 1.455 (38,32 persen dari total ekspor Sumatera Utara). Sedangkan ekspor Sumatera Utara ke kawasan Uni Eropa sebesar US\$. 711 juta (18,73 persen). Pada periode Januari-Oktober 2005, nilai impor Sumatera Utara juga mengalami peningkatan sekitar 25,09 persen dari periode yang sama tahun 2004, yakni dari US\$. 794 juta menjadi US\$. 993 juta. Peningkatan terbesar terjadi pada impor barang modal yaitu sebesar 55,14 persen, diikuti oleh bahan baku/penolong yang meningkat sebesar 25,06 persen, sedangkan barang konsumsi meningkat 6,99 persen.

Nilai impor terbesar Sumatera Utara berupa bahan baku/penolong yang nilainya mencapai US\$. 565 juta. Barang konsumsi menempati urutan kedua dengan nilai sebesar US\$. 228 juta dan terakhir berupa barang modal yang sebesar US\$. 200 juta.

Dalam konsep PDB (Produk Domestik Bruto) yang dilakukan secara nasional, komponen ekspor dan impor diartikan sebagai barang dan jasa yang keluar dari pabean Indonesia, namun untuk penghitungan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pengertian ekspor dan impor adalah lalu lintas barang dan jasa yang keluar dan masuk wilayah Sumut baik antar provinsi maupun dengan negara lain (dapat dilihat dari PDRB menurut Penggunaan). Untuk konsep Perdagangan Internasional yang akan disajikan berikut, pengertian ekspor dan impor adalah lalu lintas barang dan jasa (non migas) yang dari dan ke luar negeri berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Perkembangan perdagangan internasional provinsi Sumut pada triwulan II-2006 bergerak positif yang ditandai dengan peningkatan pangsa ekspor terhadap PDRB yakni dari sebesar 26,76% pada triwulan yang lalu menjadi 30,34% pada triwulan

laporan. Peningkatan kinerja perdagangan internasional tersebut terutama didorong oleh semakin membaiknya kinerja ekspor, sementara impor juga tumbuh positif dengan tingkat yang lebih rendah sehingga net ekspor kembali meningkat.

Pada triwulan III, ekspor diperkirakan akan kembali meningkat. Selama bulan Juli dan Agustus, realisasi ekspor kembali meningkat cukup besar yaitu US\$914 juta. Kondisi serupa juga terjadi pada impor yang realisasi selama bulan Juli dan Agustus terus meningkat yaitu sebesar US\$241 juta. Secara triwulan, ekspor bersih pada triwulan II mengalami pertumbuhan yang cukup besar yaitu 19,24% yang di dorong tingginya permintaan ekspor sebesar US\$.1.296 juta. Sementara pertumbuhan impor meskipun tumbuh positif 1,53% sebesar US\$.318 juta namun masih jauh di bawah pertumbuhan ekspor yang tumbuh sebesar 14,34%. Peningkatan ekspor tersebut mampu meningkatkan pangsa ekspor menjadi 30,34%.

Kinerja ekspor yang cukup baik tersebut juga tercermin dari peningkatan volume ekspor yang selama triwulan II naik 341 ribu ton menjadi 2.022 ribu ton, sementara volume impor meningkat 23 ribu ton menjadi 1.233 ribu ton. Kinerja perdagangan internasional selama tahun 2006 (Januari-Agustus) menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi baik dari sisi ekspor maupun impor. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai ekspor (yoy) yang naik USD.533 juta, atau tumbuh 18,97% dari nilai ekspor periode yang sama di tahun 2005, sementara nilai impor meningkat sebesar USD.117 juta atau tumbuh 15,50%.

Kinerja ekspor per komoditi non migas juga dapat dilihat berdasarkan kelompok

SITC yang merupakan klasifikasi barang menurut standar internasional. Berdasarkan SITC tersebut, ekspor Sumatera Utara selama tahun 2006 (Januari – Agustus) terutama di dominasi oleh kelompok minyak dan lemak nabati (32,97%), karet mentah (22,36%), logam yang tidak mengandung besi (8,76%), kopi, teh, coklat dan rempah-rempah (4,67%), serta barang-barang kayu dan gabus (4,39%).

Dari 20 jenis komoditi penyumbang terbesar ekspor Sumut, 16 komoditi diantaranya mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan terbesar terjadi pada kelompok barang karet mentah yakni hingga 76,8%, sementara pertumbuhan negatif terbesar terjadi pada kelompok kimia organik yakni hingga 21,6%.

Total impor Sumut pada triwulan II tersebar cukup merata pada berbagai komoditas impor. Dari 20 komoditas penyumbang impor terbesar, komoditas impor masih didominasi oleh biji logam dan sisa-sisa logam (14,2%), pupuk kimia buatan pabrik (10,8%), makanan ternak (8,1%), besi dan baja (7,2%), serta gandum dan olahan gandum (4,1%). Komoditi gandum dan olahan gandum merupakan komoditi yang mencatat pertumbuhan terbesar hingga 157,6%, disusul biji logam dan sisa-sisa logam (66,3%).

Kinerja ekspor Sumatera Utara, selama tahun 2007 (periode Januari-Desember) yang meningkat 28,22%, mencapai nilai US\$ 7,08 miliar mampu membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 4,97 miliar. Surplus perdagangan Sumut ini dicapai dari selisih atau perbandingan nilai ekspor tersebut dengan nilai impor yang juga meningkat sebesar 44,81%, mencapai US\$ 2,10 miliar.

Tabel 2. Perkembangan Ekspor - Impor Sumatera Utara Periode 2005 (qrt-I) – 2006(qrt-II)

Perdagangan	Periode					
	I-05	II-05	III-05	IV-05	I-06	II-06
Ekspor	999	1013	1187	1147	1133	1295,61
Impor	267	296	292	271	314	318,41
Net-Ekspor-Impor	732	717	896	877	819	977
Pangsa Pasar Terhadap PDRB	30,11	31,69	35,1	31,32	26,76	30,34

Sumber: Bank Indonesia

Nilai surplus perdagangan Sumut tahun 2007 tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2006 yang mencapai US\$ 4,066 miliar. Kenaikan surplus perdagangan luar negeri Sumut selama tahun 2007 ini terutama disebabkan meningkatnya penerimaan dari sektor industri yang mencapai US\$ 3,31 miliar atau mengalami kenaikan 32,97persen. Sektor pertanian juga mencatat surplus US\$ 1,69 miliar, lebih besar dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat surplus US\$ 1,58 miliar, atau mengalami kenaikan 6,57%, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mengalami defisit US\$ 32,6 juta.

Komoditas utama yang mengalami peningkatan nilai ekspor pada sektor industri adalah minyak lemak nabati lainnya, cair atau kental termasuk minyak kelapa sawit/CPO (SITC 422) nilai sebesar 65,22%, dengan nilai ekspor US\$ 2,96 miliar. Diikuti ekspor komoditas kertas dan sisa-sisa kertas (SITC 251) yang naik sebesar 49,02% dengan nilai ekspor US\$110,39 juta.

Komoditas sektor industri yang nilai ekspornya mengalami penurunan di antaranya plywood, tripleks, dan lainnya (SITC 634) turun sebesar 19,08%. Komoditas utama yang mengalami peningkatan nilai ekspor pada sektor pertanian di antaranya komoditas kopi (SITC 071) meningkat 23,45% dan komoditas getah karet alam, karet alam lainnya (SITC 231) mengalami peningkatan sebesar 5,52%. Ekspor ke negara Jepang menempati urutan pertama dengan perannya sebesar 13,41% terhadap total ekspor Sumut dengan nilai ekspor US\$ 949,64 juta, diikuti India dengan kontribusi sebesar 12,81% terhadap total ekspor Sumut dengan nilai ekspor US\$ 907,38 juta. RRC di urutan ketiga, dengan kontribusinya sebesar 8,76% terhadap total ekspor Sumut dengan nilai ekspor US\$ 620,43 juta.

Peningkatan nilai impor disebabkan karena meningkatnya impor dari ketiga kelompok barang ekonomi masing-masing kelompok, barang modal mengalami kenaikan sebesar 84,42%, impor barang konsumsi 38,52%, dan impor bahan baku penolong sebesar 38,90%. Kontribusi terbesar impor Sumut periode Januari-Desember 2007 adalah impor bahan baku penolong sebesar 58,37% dengan nilai impor mencapai US\$ 1,23 miliar. Diikuti oleh impor barang konsumsi sebesar 24,82%

dengan nilai impor mencapai US\$ 523,64 juta, dan impor barang modal sebesar 16,81% dengan nilai impor US\$ 523,64 juta, dan impor barang modal sebesar 16,81% dengan nilai US\$ 354,69 juta.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan dari studi ini yaitu untuk menganalisa pengaruh perubahan nilai tukar riil terhadap perilaku ekspor dan impor (*trade flows*) serta menganalisa apakah depresiasi nilai tukar riil akan memperbaiki kinerja *trade balance* maka alat analisis dalam studi ini adalah elastisitas ekspor dan impor akibat perubahan nilai tukar riil.

Hasil estimasi permintaan ekspor dan impor dipresentasikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 mengindikasikan bahwa permintaan ekspor dalam jangka panjang dipengaruhi secara signifikan oleh *tingkat harga barang, pendapatan luar negeri, dan REER* serta dengan arah hubungan tanda yang sesuai dengan hipotesis. Penurunan harga 1% akan diikuti dengan kenaikan permintaan volume ekspor 0,61% dengan kata lain elastisitas harga sebesar 0,61. Permintaan ekspor juga dipengaruhi positif oleh pendapatan luar negeri dan bersifat *elastis* dimana kenaikan pendapatan luar negeri (importir) sebesar 1% akan meningkatkan permintaan ekspor 1,31% atau *income elasticity* lebih besar dari 1. pengaruh REER terhadap permintaan ekspor juga signifikan dengan tanda sesuai dengan hipotesa dimana depresiasi nilai tukar efektif riil (REER) akan berpengaruh untuk meningkatkan permintaan ekspor. Depresiasi REER sebesar 1% akan meningkatkan permintaan volume ekspor sebesar 1,83% atau *Exchange Rate Elasticity* sebesar 1,83.

Hasil estimasi permintaan impor dalam jangka panjang dipresentasikan dalam Tabel 4. Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa permintaan impor Sumatera Utara dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat harga, pendapatan, REER serta variabel DUMMY. Tabel mengindikasikan bahwa kenaikan harga barang impor sebesar 1% akan mengakibatkan permintaan terhadap barang tersebut turun sebesar 0,93% atau *price elasticity* dari barang impor sebesar 0,93. Permintaan barang impor juga dipengaruhi secara signifikan oleh Pendapatan (PDRB Sumatera Utara), dimana kenaikan pendapatan 1% akan meningkatkan permintaan impor 1,82% dengan kata lain

income elasticity >1. Variabel Dummy juga berpengaruh positif terhadap permintaan impor Sumatera Utara. Selanjutnya nilai tukar riil efektif (REER) secara netto berpengaruh signifikan secara positif terhadap permintaan impor Sumatera Utara yang berarti depresiasi nilai tukar riil akan menurunkan permintaan impor dan

sebaliknya. Meskipun demikian dampak REER secara total terhadap impor relatif kecil. Elastisitas nilai tukar riil (REER) sebesar 1% akan meningkatkan permintaan ekspor sebesar 0.64%. yang berarti jika terjadi depresiasi nilai tukar riil sebesar 1% maka volume impor akan menurun sebesar 0.64%.

Tabel 3. Ekspor Non Migas Sumatera Utara

Dependent Variable: LXD?				
Method: GLS (Cross Section Weights)				
Date: 05/26/08 Time: 20:52				
Sample: 2002M01 2007M07				
Included observations: 67				
Number of cross-sections used: 20				
Total panel (unbalanced) observations: 1325				
One-step weighting matrix				
Cross sections without valid observations dropped				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LPX?	-0.608155	0.025606	-23.75049	0.0017
LGDP?	1.313301	0.241662	5.434454	0.0123
LREER?	-1.833388	0.197834	-9.267305	0.0097
Fixed Effects				
PLYWOOD--C	7.360679			
RUBBER--C	6.238030			
GARMENTS--C	7.425424			
SAWN--C	6.243024			
TEXTILE--C	8.554452			
COFFEE--C	6.033849			
LOBSTER--C	7.023138			
HANDICRAFT--C	7.236278			
IRONSTEEL--C	6.334942			
PALM--C	9.244372			
ALLUMINIUM--C	6.434619			
PULP--C	9.643465			
COPRA--C	6.858309			
FOODSTUFFS--C	6.235953			
TEA--C	8.840380			
FERTILIZER--C	6.261544			
GLASS--C	8.752017			
ELICTRICAL--C	8.637048			
TUNA--C	8.637042			
OTHERS--C	6.242469			
Weighted Statistics				
R-squared	0.673585	Mean dependent var		1.617668
Adjusted R-squared	0.653252	S.D. dependent var		0.731212
S.E. of regression	0.736041	Sum squared resid		705.3659
Log likelihood	-1462.352	F-statistic		10.21292
Durbin-Watson stat	1.743152	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.673336	Mean dependent var		1.617544
Adjusted R-squared	0.653505	S.D. dependent var		0.731120
S.E. of regression	0.736041	Sum squared resid		705.3659
Durbin-Watson stat	1.743156			

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews

Tabel 4. Impor Non Migas Sumatera Utara

Dependent Variable: LMD?				
Method: GLS (Cross Section Weights)				
Date: 05/27/08 Time: 11:40				
Sample: 2002M01 2007M07				
Included observations: 67				
Number of cross-sections used: 18				
Total panel (unbalanced) observations: 1154				
One-step weighting matrix				
Cross sections without valid observations dropped				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LPM?	-0.926925	0.028596	-32.41450	0.0233
LPDRB?	1.815288	0.064332	28.21754	0.0000
LREER?	0.635447	0.365892	1.736706	0.2124
LDUMMY?	0.136114	1.285405	0.105892	0.5384
Fixed Effects				
_MACHINERY—C	-8.146169			
_CHEMICAL—C	-9.574936			
_BASEMETAL—C	-7.272077			
_PLASTIC—C	-7.463638			
_MFMOTORCARS--C	-8.164157			
_PAPER—C	-7.757741			
_SMANUFMETALS--C	-4.667827			
_CEREALS—C	-8.276111			
_RAWCOTTON—C	-8.453104			
_VESSELSMOTOR--C	-6.565326			
_PHARMAPROD--C	-9.344021			
_VEHICLES--C	-7.431074			
_MOTORCYCLE--C	-7.546656			
_TRACTORS--C	-8.260571			
_ALLUMINIUM--C	-8.553602			
_AIRCRAFT--C	-7.351740			
_ELICTRICALAPL--C	-7.861322			
_OTHERS--C	-9.273715			
Weighted Statistics				
R-squared	0.754720	Mean dependent var		1.621205
Adjusted R-squared	0.739039	S.D. dependent var		0.728315
S.E. of regression	0.675789	Sum squared resid		516.9742
Log likelihood	-1173.972	F-statistic		9.866718
Durbin-Watson stat	1.801420	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.753390	Mean dependent var		1.620806
Adjusted R-squared	0.737684	S.D. dependent var		0.727743
S.E. of regression	0.675789	Sum squared resid		516.9745
Durbin-Watson stat	1.803382			

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews

Rendahnya elastisitas impor ini kemungkinan terkait dengan hal berikut. Dengan depresiasi nilai tukar riil maka permintaan ekspor diperkirakan akan meningkat karena meningkatnya daya saing produk Sumatera Utara di luar negeri (lihat estimasi permintaan impor). Akan tetapi, *import content* dari produk ekspor tersebut cukup signifikan sehingga depresiasi nilai

tukar riil akan meningkatkan permintaan impor. Namun demikian, untuk produk yang pemasarannya lebih cenderung ke domestik, maka dengan adanya depresiasi nilai tukar riil akan mengurangi daya saing produk mereka sehingga kemungkinan akan berpengaruh ke output akibatnya permintaan bahan baku untuk produk pemasarannya lebih ke pasar domestik akan berkurang.

Sehingga disatu sisi depresiasi kemungkinan akan meningkatkan permintaan impor (*untuk industri import oriented*) tetapi disisi lain kemungkinan juga akan mengurangi permintaan impor (*untuk industri yang pemasarannya import oriented*). Sehingga secara netto dampak depresiasi nilai tukar riil terhadap permintaan impor tidak cukup tinggi.

Sementara, dengan dasar teori Marshall-Lerner Condition yang telah didiskusikan sebelumnya, maka berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa penjumlahan elastisitas ekspor dan impor sebagai respon dari perubahan nilai tukar riil (REER) dalam jangka panjang lebih dari 1, maka syarat Marshall-Lerner Condition terpenuhi di Sumatera Utara untuk periode Januari 2002 - Juli 2007. Sehingga depresiasi nilai tukar riil (dalam hal ini REER) telah meningkatkan kinerja *trade balance* terutama untuk jangka panjang. Oleh karena untuk membuktikannya lebih lanjut itu perlu dianalisa J-Curve.

Elastisitas ekspor dan impor biasanya dapat dilihat dalam jangka pendek dan jangka panjang sehingga analisis Marshall-Lerner Condition juga dapat diterapkan untuk jangka pendek dan panjang. Elastisitas ekspor dan impor dalam jangka panjang ini terkait dengan *J-Curve Hypothesis*. Untuk mengetahui apakah di Sumatera Utara dampak depresiasi nilai tukar riil terhadap *trade balance* mengikuti pola J-Curve maka perlu menghitung elastisitas jangka panjang. Dari hasil estimasi maka elastisitas harga, pendapatan dan nilai tukar (REER) dalam jangka panjang dipresentasikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Elastisitas Harga, Pendapatan, dan REER

Elastisitas	Jangka Pendek		Jangka Panjang	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Harga	-0.37	-0.80	-0.61	-0.93
Pendapatan	1.25	1.31	1.31	1.82
REER (<i>Real Effective Exchange Rate</i>)	-0.97	0.04	-1.83	0.64

Sumber: *Output Eviews 4.1 (diolah)*

Elastisitas nilai tukar dalam studi ini merepresentasikan perubahan volume ekspor (dan impor) karena adanya perubahan REER 1%. Seperti telah didiskusikan sebelumnya bahwa dalam jangka pendek maka depresiasi REER tidak akan meningkatkan kinerja trade

trade balance karena tidak terpenuhinya *Marshall-Lerner Condition*. Namun demikian, hasil estimasi dalam jangka panjang mengindikasikan bahwa depresiasi nilai tukar riil akan meningkatkan kinerja *trade balance* secara sangat signifikan karena elastisitas ekspor dan impor dalam jangka panjang > 1 yaitu sebesar 2.86. Sehingga *Marshall-Lerner Condition* terpenuhi untuk jangka panjang. Dalam hal ini berarti penurunan nilai tukar riil rupiah telah direspon secara positif oleh importir U.S dalam jangka panjang, dimana mereka meminta lebih banyak barang ekspor karena terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi pada awal tahun 2002.

KESIMPULAN

1. Ekspor dan investasi mempunyai peranan penting dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terakhir ini. Komposisi ekspor non migas didominasi oleh ekspor sektor industri, tetapi tidak semua sektor industri mempunyai daya saing eksternal yang tinggi. Daya saing eksternal yang diukur dengan *RCA* mengindikasikan bahwa daya saing tertinggi lebih terkait pada *natural resources base primary industri*. Hal ini kemungkinan terkait dengan produk alam yang melimpah di Sumatera Utara sehingga biayanya relatif lebih rendah (misalnya kelapa sawit, dan karet).
2. Komposisi impor lebih didominasi oleh bahan baku untuk industri. Dengan makin membaiknya perekonomian maka diperkirakan impor bahan baku (dan impor barang modal) makin meningkat. Meskipun impor barang konsumsi juga meningkat tetapi peningkatannya relatif kecil dibandingkan dengan peningkatannya relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan impor bahan baku.
3. Hasil estimasi dari studi ini mengindikasikan bahwa nilai tukar riil berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan ekspor dan impor. Depresiasi REER 1% akan meningkatkan volume ekspor sebesar 1.83% atau *Exchange Rate Elasticity* sebesar 1,83. Sedangkan depresiasi REER 1% akan menurunkan permintaan volume impor secara netto sebesar sebesar 0.05%.

4. studi ini tidak mendukung adanya Marshall-Lerner untuk jangka pendek tetapi untuk jangka panjang tampak adanya Marshall-Lerner Condition. Demikian juga, dengan fenomena pola J-Curve tampaknya juga terjadi di Sumatera Utara periode 2002-2005. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang didapati dimana elastisitas ekspor dan impor dalam jangka panjang adalah sebesar 2,86. Sehingga, depresiasi nilai tukar riil akan memperbaiki kinerja *trade balance* secara signifikan dalam jangka panjang. Sehingga studi ini menyimpulkan bahwa depresiasi nilai tukar riil efektif (REER) akan memperbaiki kinerja *trade balance* baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang secara signifikan. Dengan kata lain, meskipun REER mengalami penurunan pada awal tahun 2002 dalam jangka pendek (selama 3 bulan) gejala ini dapat menurunkan permintaan ekspor, namun dalam jangka panjang gejala tersebut dapat meningkatkan permintaan ekspor yang cukup efektif untuk *mengoffset* peningkatan nilai impor sehingga *trade balance* dapat meningkat secara signifikan.

SARAN

Studi ini merekomendasikan bahwa kebijakan untuk meningkatkan *trade balance* seyogianya harus tetap difokuskan melalui kebijakan nilai tukar. Peningkatan atau penurunan nilai tukar akan sangat mempengaruhi kinerja perdagangan (ekspor dan impor Sumatera Utara). Dalam hal ini para pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam menentukan nilai tukar rupiah, karena pengaruhnya yang cukup signifikan, kesalahan dalam menentukan nilai tukar akan menyengsarakan banyak orang khususnya para pengusaha yang bergerak dibidang ekspor dan impor. Namun terdapat juga faktor-faktor lain untuk menunjang daya saing yang seyogianya oleh pemerintah ataupun para pengambil kebijakan/stakeholder perlu ditingkatkan misalnya peningkatan produktifitas, efisiensi, kualitas produk, pengurangan pungutan tidak resmi, serta penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif, melalui berbagai kebijakan termasuk kebijakan moneter dan fiskal.

Kenaikan ekspor yang disebabkan oleh *faktor bukan kebijakan nilai tukar* juga akan meningkatkan kinerja ekspor. Peningkatan ekspor ini tidak akan diikuti dengan kenaikan nilai impor (karena nilai tukar tidak berubah) sehingga membantu meningkatkan kinerja *trade balance*. Disamping itu untuk memperkuat kinerja *trade balance* juga dapat dilakukan melalui perbaikan struktur industri. Dalam jangka panjang, struktur industri diarahkan untuk tidak tergantung pada bahan baku impor sehingga perlunya menciptakan industri penunjang didalam negeri.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia (2004), *Macroeconomic Model of Bank Indonesia*, Desember.
- Bahmani-Oskooee, M. (1985), *Devaluation and The J-Curve: Some Evidence From LDCs*, The Review of Economics and Statistics, 500-04.
- Baxter, M (1995), *International Trade and Bussiness Cycle*, NBER Working paper 5025, Washington D.C. National Bureau of Economics Research, Inc.
- Bayoumi T. (1999), *Estimating Trade Equation From Agregat Bilateral Data*, IMF Working paper 99/74, Washington D.C., International Monetary Fund.
- Bouoiyour, Jamal and Serge REY (2002), *Exchange Rate Regime, Real Exchange Rate, Trade Flows and Foreign Direct Investment: The case of Morocco*, Centre d'Analyse Theorique et de Traitement des Donnes Economiques, France.
- Boyd D, Caporale G, Smith R (2001), *Real Exchange Rate Effect on The Balance of Trade, Cointegration and Marshall-Lerner Condition*, International Journal and Finance 6 (3), 187-200.
- Carbaugh, Robert J. (2006), *International Economics*, 10th edition. Thomson South-Western; Canada.
- Cerra, Valerie and Sweta Charman Saxena (2002), *An Empirical Analysis of Chinas Export Behavior*, IMF Working Paper, No. 200, IMF, Washington D.C., November.

- Duttagupta, Rupa and Antonio Apilimbargo (2000), *What Happened to Asian Export During The Crisis?*, IMF Working Paper, No. 200, IMF, Washington D.C., December.
- Edward, Sebastian. (1994), *Real and Monetary Determinant of Real Exchange Rate Behavior: Theory and Evidence in Developing Countries In estimating Equilibrium Exchange Rate*, ed. Williamson. Intitute for International Economics, Washington D.C.
- Goldstein, Morris, and Mohis. S. (1985), *Income and Price Effect in Foreign Trade. Handbook of International Economics*, ed. by Ronald W.Jones and Peter B. Kenen. Vol 2. New York: North Holland Press.
- Golgfajn, Ilan and Sergio R.C. Werlang (2000), *The Pass-through From Depreciation: A panel Study*, Texto Para Discussão No. 423, Rio De Janeiro, Brazil.

CROSS BORDER SPATIAL COOPERATION DALAM KONTEKS DISPARITAS EKONOMI WILAYAH SUMATERA UTARA

Sirojuzilam

Regional Economist

e-mail: siro_juzilam@yahoo.co.id

***Abstract:** Regional economic growth influence by internal or external factors. Economic growth as indicated by the capabilities of a region to supplied various economic goods for the resident on the long run period. Various problem raised on conjunction with regional economic growth. Regional disparities and equally development distribution becoming main problem on regional growth.*

***Keywords:** cross border spatial cooperation and regional disparity*

PENDAHULUAN

Berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kenyataannya banyak fenomena tentang pertumbuhan ekonomi wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan wilayah, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tidak akan bermanfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan, sehingga pemahaman mengenai faktor-faktor pertumbuhan wilayah dan proses penjalaran pertumbuhan merupakan hal yang penting. Beberapa perbedaan antara wilayah barat dan wilayah timur Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa persoalan seperti, pertumbuhan ekonomi, investasi (domestik dan asing), luas wilayah, konsentrasi industri dan lain sebagainya.

Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di antara jalur perdagangan internasional dan berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapura. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 1961 – 2007 menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari total penduduk Provinsi Sumatera Utara berdomisili di Wilayah Timur dengan luas wilayah sebesar 34,81% dari total wilayah Provinsi Sumatera Utara dan kurang dari 20% penduduk Provinsi Sumatera Utara berdomisili di Wilayah Barat dengan total luas wilayah sebesar 25,05% dari total Provinsi Sumatera Utara.

Pada periode 1983-1992 jumlah investasi domestik di Wilayah Timur berjumlah Rp 175,435 milyar dan pada

periode 1993-1999 meningkat menjadi Rp 329,143 milyar, akan tetapi pada periode 2000-2007 investasi domestik mengalami penurunan menjadi Rp 273,442 milyar hal ini tentunya disebabkan oleh dampak krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan Tahun 1997 yang lalu

Sebaliknya di Wilayah Barat jika dibandingkan dengan Wilayah Timur, investasi oleh pihak domestik jauh lebih rendah untuk periode yang sama. Pada periode 1983-1992 dan periode 1993-1999 tidak terjadi investasi yang dilakukan oleh pihak asing di Wilayah Barat, namun baru terjadi pada periode 2000-2005. Sebaliknya di Wilayah Timur investasi oleh pihak asing cukup besar untuk periode yang sama.

Persebaran investasi yang dilakukan oleh investor asing di berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara relatif terkonsentrasi di beberapa wilayah saja. Dari total realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 4,028 miliar dollar, lebih dari separuhnya terealisasi di Kabupaten Asahan. Selebihnya terkonsentrasi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah sama sekali tidak diminati oleh investor asing.

Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Utara telah membawa dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selama tahun 1968-2005 jumlah tenaga kerja lokal yang telah terserap mencapai 68.948 orang, sementara tenaga kerja asing yang bekerja di Provinsi Sumatera Utara mencapai 411 orang. Apabila dibandingkan dengan rencananya yang mencapai 174.879 orang, realisasi

penggunaan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 40% dari rencananya. Bahkan realiasi penggunaan tenaga kerja asing lebih rendah lagi, hanya 21% dari rencananya.

Lebih lanjut, penyerapan tenaga kerja lokal dari PMA di Provinsi Sumatera Utara hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah saja. Sekitar 80% dari total tenaga kerja domestik yang terserap oleh PMA berada di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kabupaten Asahan. Hal ini sejalan dengan jumlah investasi asing yang memang sebagian besar berada di wilayah tersebut. Sementara itu di beberapa kabupaten/kota seperti Nias Sibolga, dan Tapanuli Tengah masih belum merasakan dampak PMA di wilayahnya.

Kondisi lain yang menjadi perhatian utama adalah sarana transportasi terutama panjang jalan yang ada di setiap wilayah baik di Wilayah Barat maupun di Wilayah Timur dapat digambarkan bahwa panjang jalan rata-rata di wilayah barat periode 1983-2005 adalah 124.724,61 Km (24,53% dari total panjang jalan di Sumatera Utara) dan di wilayah timur adalah 218.624,55 Km (43,0%).

Perbedaan penyebaran dan konsentrasi industri baik industri sedang maupun besar di Wilayah Barat dan Wilayah Timur dari Tahun 1983-2005 menunjukkan bahwa jumlah industri lebih terkonsentrasi di wilayah timur dengan jumlah 15.554 perusahaan dan di wilayah barat hanya berjumlah 698 perusahaan.

Secara umum dengan menggunakan indeks Williamson dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi diantara ke dua wilayah baik barat maupun timur dapat dijelaskan bahwa secara rata-rata di wilayah timur angka ketimpangannya lebih besar secara relatif dibandingkan dengan wilayah barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Sektor Jasa, Perdagangan serta Industri Wilayah

Ada banyak cara dalam upaya untuk meningkatkan *local economic development* bagi setiap wilayah sehingga sektor sekunder (industri dan konstruksi) kontribusinya mencapai lebih dari 30% terhadap PDRB untuk menjadikan ekonomi yang industrialis

berdasarkan penerapan *science technology dan knowledge base* antara lain: 1) Pengembangan industri yang mampu menghasilkan *additional returns* yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar serta penguatan terhadap imbalan yang diterima oleh para pekerja. 2) Pengembangan industri yang berpotensi membawa *spillover* teknologi bagi sector ekonomi lainnya dengan mengembangkan sumber daya manusia, modal, infrastruktur baik fisik maupun nonfisik. Infrastruktur tidak terbatas hanya pada infrastruktur fisik tapi juga pada infrastruktur non fisik seperti fasilitas umum, fasilitas social, *marketing capability*, dan *technological capability*. 3) Pengembangan industri yang memiliki *comperative advantage* ke *competitive advantage* berdasarkan kepada industri unggulan yang dimiliki dengan melakukan *cluster* terhadap jenis industri yang ada. 4) Mengembangkan sektor tersier (perdagangan dan jasa keuangan-perbankan), sehingga tercipta kota perdagangan baik local, nasional maupun internasional. 5) Pengembangan industri ditinjau dari kepadatan (*intensive*) dan isi (*content*) dalam hal penggunaan sumber daya alam (*natural resources intensive*), tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor intensive*), tenaga kerja terlatih (*human capital intensive*), *physical capital intensive*, penggunaan teknologi (*technology capital intensive*) merupakan upaya mengidentifikasi komoditas yang kompetitif yang berasal dari daerah ini dalam rangka kebijakan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi. Dan 6) Pembangunan dan proses industrialisasi dititikberatkan kepada kegiatan ekonomi yang banyak memanfaatkan sumberdaya tenaga kerja.

Perkembangan PDRB dan pertumbuhan ekonomi dari setiap daerah untuk periode 1983-2005, maka dapat diklasifikasikan wilayah di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: Daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat tumbuh dan sepat maju adalah Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Langkat. Sedangkan daerah yang termasuk daerah berkembang cepat adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Untuk daerah yang relatif

tertinggal adalah Kabupaten Nias dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Konsentrasi industri di Wilayah Timur terutama berada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Asahan yaitu kabupaten/kota dengan jumlah industri berada di atas 500 unit industri. Dari kenyataan tersebut dapat dinyatakan penyebaran industri di kedua wilayah sangat timpang dan hal tersebut akan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Daerah konsentrasi industri tinggi diasumsikan akan mempunyai aglomerasi ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah atau daerah yang memiliki konsentrasi industri yang lebih rendah atau daerah yang bukan konsentrasi industri. Oleh karena itu wilayah dengan konsentrasi industri yang lebih tinggi intensitasnya akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah dengan konsentrasi industri yang lebih rendah.

Bahwa jumlah industri untuk periode 1994-2005 di Wilayah Barat yaitu 370 unit lebih kecil dibandingkan dengan di Wilayah Timur yang berjumlah 9453 unit. Dari nilai tambah yang dihasilkan sudah tentu industri di Wilayah Timur menyumbangkan lebih besar yaitu berjumlah 64,708 milyar rupiah dibandingkan dengan Wilayah Barat hanya 2,495 milyar rupiah. Begitu pula dalam hal penyerapan tenaga kerja di Wilayah Timur menyerap tenaga kerja sebesar 1.514.157 orang sedangkan di Wilayah Barat menyerap tenaga kerja sebesar 50.073 orang.

Kerjasama Interregional dan Disparitas Ekonomi Wilayah

Mengembangkan dan membangun suatu wilayah harus meliputi berbagai wilayah sehingga dapat menciptakan manfaat potensi ekonomi wilayah yang pada saatnya akan menciptakan daya saing ekonomi yang kuat untuk wilayah tersebut. Perencanaan wilayah mencakup terhadap semua aspek pembangunan yang bersifat komprehensif dan holistik yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat. Berbagai faktor dalam arena dan agenda *planning world and life world* seperti integrasi ekonomi, politik, dan sosial serta budaya maupun adat istiadat, akan bemuara kepada dunia perencanaan yang tentunya sangat kompleks. Perencanaan

wilayah diharapkan dapat menciptakan sinergi untuk memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah (Miraza H., 2004).

Perencanaan wilayah akan sangat terpaut kepada: (a) agenda dan actor perencanaan, (b) lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi, (c) penyebaran penduduk dan pusat-pusat permukiman baru, (d) adanya perubahan pada struktur ruang wilayah dan prasarana, (e) perlunya penyediaan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, (f) perencanaan *net working* yang dapat menghubungkan berbagai aktivitas di wilayah secara efisien.

Kerjasama menurut Gidman (1995) adalah untuk memanfaatkan sebesar mungkin keuntungan komparatif dari mitra kerja sama, daripada mengabaikan sama sekali potensi mitra kerja sama. Sedangkan (Ostrom, 1994) memberikan penekanan pada pentingnya *bottom – up cooperation* daripada *top – down cooperation* yang umumnya difasilitasi oleh pemerintah.

Bahwa tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain walaupun telah ada peraturan yang mendasarinya. Namun, kerja sama antardaerah dengan pendekatan wilayah tetap diperlukan. Masalah yang sering muncul adalah bagaimana mengatur suatu kerja sama antara pemerintah daerah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama itu sendiri, pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak, masalah dana pendukung kerja sama, dan aspek lainnya.

Pengalaman di Sumatera Utara juga memperlihatkan sering timbul permasalahan baru antar wilayah (kabupaten/kota) dalam segala aspek pembangunan. Misalkan saja ada persoalan diantara Kabupaten Karo dengan Kota Medan dalam pengelolaan air. Hal ini disebabkan karena sumber air Medan berasal dari tanah Karo, artinya berapa dan apa kontribusi (share) Kota Medan untuk tanah Karo sebagai (katakanlah) pemilik sumber air.

Pembangunan dengan basis yang kokoh dan berkesinambungan dengan pemanfaatan segenap sumberdaya secara optimal sehingga terhindarkan dari *enclave* dan *esklusivisme* berdasarkan kepada prinsip *resousce base*.

Seperti pada pendahuluan di atas agar kekuatan ekonomi wilayah dapat dicapai dan

ditingkatkan, maka diperlukanlah kerjasama regional (antar daera/kota dan interregional) melalui *cross border spatial cooperation* dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan implementasi perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi. Pengembangan ekonomi dan penataan ruang yang baik dengan mengamati potensi yang ada, diharapkan terjadi harmonisasi interregional dalam proses pembangunan serta memperhatikan daya dukung wilayah dan potensi wilayah sekitarnya (*hinterland*).

KESIMPULAN

Heterogenitas suku di Wilayah Timur Sumatera Utara telah berdampak positif terhadap peningkatan output dan tingkat persaingan yang semakin kuat (Sirojuzilam, 2007). Mobilitas penduduk yang kemudian disebut sebagai suku pendatang banyak memberikan keuntungan tidak saja secara lokasi tetapi juga kewilayahan.

Jika Sumber Daya Alam adalah merupakan *endowment factors* sebagai suatu anugerah secara alamiah, maka ketimpangan wilayah juga disebabkan oleh Sumber Daya Manusia atau faktor budaya. Pengalaman seperti ini terjadi di Amerika Serikat yang menunjukkan adanya perbedaan budaya diantara wilayah utara dan wilayah selatan. Kerusakan hubungan antara manusia dengan alam mengakibatkan agama dan kreatifitas seni semakin maju. Wilayah dengan nuansa agrarisnya yang lebih kental akan menyebabkan terbentuknya perbedaan dengan masyarakat di wilayah yang kegiatan industrinya lebih dominan (Higgins, 1995).

Peningkatan terhadap **kerjasama antar wilayah** dan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusianya secara menyeluruh dan melibatkan banyak orang., mengurangi tingkat pengangguran dengan melakukan peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya serta menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan imbalan balas jasa yang diterima masyarakat serta peningkatan daya beli dalam rangka mengurangi kesenjangan, kemiskinan absolut dan ketimpangan wilayah.

SARAN

Bahwa adanya perbedaan dan ketimpangan diantara Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara akibat adanya perbedaan potensi sumber daya wilayah, infrastruktur transportasi,

pengeluaran pemerintah, pendidikan, sumber daya manusia, kepadatan penduduk, investasi dan sumber daya alam, maka tipe perencanaan dan kebijakan regional tidaklah harus sama diantara berbagai wilayah. Tipe **perencanaan parsial** sangatlah penting untuk diterapkan mengingat perencanaan dimensi regional sangat memperhatikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dan aspek lokasi dari masing-masing wilayah. Walaupun demikian pendekatan **perencanaan parsial** dapat dipadukan dalam keangka pendekatan perencanaan sektoral. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan sektoral yang selama ini dijalankan belum memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan di daerah. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam melihat aspek ruang di suatu daerah.

Pemerintah daerah sangatlah mengerti dan mengetahui akan daerahnya sendiri, daerah mempunyai kepentingan dan daya tarik yang berbeda-beda, sehingga dalam upaya perencanaan pembangunan wilayah sangat penting diperhatikan pendayagunaan perencanaan aktivitas terhadap ruang wilayah. Hal inilah kemudian daerah harus didorong untuk melakukan *cross border spatial cooperation* (kejasama antar wilayah).

DAFTAR RUJUKAN

- Azis, Iwan Jaya, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE-UI, Jakarta.
- Barro, R & X. Sala-i-Martin, 1995, *Economic Growth*, McGraw Hill, Inc. New York.
- Bendavid-Val, Avrom, 1991, *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, 4th Edition, Praeger Publisher, New York.
- Blair, John P., 1995, *Local Economic Development: Analysis and Practice*, Sage Publication. USA.
- Fujita, Masahita, 2002, *Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location and Regional Growth*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Glasson, John, 1977, *Pengantar Perencanaan Regional*, (terjemahan), LPFE-UI, Jakarta.

- Gore, Charles, 1984, *Region in Question: Space, Development Theory and Regional Policy*, Published in USA by Methuen & Co, Ltd 11 New Fetter Lane, London.
- Heideman, Claus, 1990, *Planning Theory*, IfR (Institut Für Regionalwissenschaft), West Germany.
- Higgins, Benjamin and Donald J, Savoie, 1995, *Regional Development: Theories and Their Application*, New Brunswick, N.J, Transaction Publishers, USA
- Hill, Hal, 1989. *Unity and Diversity: Regional Economic Development In Indonesia Since 1970*, Oxford University Press, London.
- Isard, Walter, 1960, *Methods of Regional Analysis*, MIT Press, United State of Amerika.
- Sirojuzilam, 2005, *Beberapa Aspek Pembangunan Regional*, ISEI Bandung, Jawa Barat.
- Sirojuzilam, 2006, *Teori Lokasi*, USU Press, Medan.
- Fang, Cai & Dewen, Wang, 2003, Regional Comparative Advantage in China: Differences, Changes And Their Impact on Disparity, *The Intitute of Population and labor Economics, Chines Academy of Social Sciences*, Beijing, 100732, China.
- Fleischer, M. Belton & Chen, Jian, 1996, The Coast-Noncoast Income Gap, Productivity, and Regional Economic Policy in China, *Dept. of Economics The Ohio State University*, Columbus, OH 43210 and Dept. of Economics Kenyon College, Gambier, OH 43022.
- Guiso, Sapienza and Zingales, (2004), Cultural Biases in Economic Exchange, Working Paper 11005, *National Bureau of Economic Research*, 1050, Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138.
- Han, Taejoon, 1996, China: a shared poverty to uneven wealth, The George Washington University, *The Elliott School of International Affairs*, ECON 270 – Chinese Economy.
- Haughton, Graham and David, Counsell, 2004, *Region, Spatial Strategies and Sustainable Development*, First published by Routledge, London.
- Levine, R., 1997. “Financial Development and Economic Erowth: Views and Agenda”. *Journal of Economic Literature* 35, 688-726.
- Lipshitz, Gabriel, 1992 dan 1996, Regional Disparities: The Canadian Case in the Theoretical Context, *Departement of Geography*, Bar-Ilan University, Israel.

PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. INALUM DIVISI PLTA SIGURA-GURA TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIO-EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN PINTUPOHAN MERANTI, KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Siti Zaleha

Alumnus S2 PWD SPs USU

Abstract: *This study aims at 1) describing CSR form and concept of PT. Inalum that have been implement to the community of Pintupohan Meranti Subregency. 2) analyzing the role of CSR in improving social-economic conditions of the community. 3) analyzing the correlation of CSR to developed local markets of the Pintupohan Meranti Subregency.*

The metode of data analysis of this study include descriptive analysis, comparison of mean analysis and simple correlation analysis.

This studies results showed that CSR of PT. Inalum has no a planning document: CSR is being considered as cost to PT Inalum and still not being considered as social investment, poor social participation of the community make it concept of welfare did not work well for the community development.

Keywords: *corporate social responsibility, sosio-economic community, and local economic development*

PENDAHULUAN

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana laba (*profit centre*). Konsep ini menurut World Bank (Fox, Wared and Howard 2002), merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Di lain sisi masyarakat mempertanyakan apakah sektor swasta atau perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk redistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal. Memang sangat sulit dipahami bahwa lembaga kapitalistik melakukan kegiatan nirlaba sebagai manifestasi tanggung jawab moralnya pada masyarakat lokal yang hidupnya di sekitar perusahaan (Mulyadi, 2003).

Pengembangan program pada suatu perusahaan tidak bisa mengadopsi penerapan dari perusahaan lain yang dinilai lebih sukses. Program yang diimplementasikan dengan baik (*well implemented*) di suatu perusahaan tidak akan

serta merta cocok untuk dipraktekkan di perusahaan lainnya. Jadi diperlukan modifikasi dan kreativitas seperlunya agar program tersebut sesuai (*inline*) dengan situasi kondisi yang dihadapi. Kegiatan kedermwanaan perusahaan dari *charity* ke dalam kemas *philanthropy* berkembang dengan penekanan dari fasilitasi dan dukungan pada sektor-sektor produktif kearah sektor sosial yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan kerjasama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti plasma dan lain sebagainya, hingga pada dasawarsa terakhir diwarnai dengan beragam pendekatan seperti pendekatan *integral*, pendekatan *stakeholder*, pendekatan sistem dan proses, maupun pendekatan masyarakat madani (*civil society*).

Konsep ini mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat di dalam dan di luar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan

membangun masyarakat dari berbagai aspek/bidang.

Program yang diimplementasikan dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat dalam mencapai sosial-ekonomi yang lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya yang lebih baik dengan tercapainya sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesadaran. Sasaran kapasitas masyarakat harus dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*). Semua berjalan ideal secara simultan dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) didirikan pada tahun 1976 yang merupakan perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co. Ltd. Komposisi saham yang ada saat ini adalah 41,12% dimiliki oleh Nippon Asahan Aluminium dan 58,85% di miliki pemerintah Indonesia dan pada tahun 2013 saham PT. Inalum sepenuhnya sebesar 100% adalah menjadi milik pemerintah dan rakyat Indonesia. PT. Inalum memiliki sarana utama divisi PLTA Sigura-gura dan divisi peleburan aluminium, merupakan dua unit perusahaan industri energi strategis yang tumbuh dan berkembang sangat cepat menjadi perusahaan korporasi yang telah memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional berupa *annual fee*, maupun bagi kalangan masyarakat yang terakomodasi oleh perusahaan yaitu bagi masyarakat Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir dan Kecamatan Pintupohan Meranti khususnya.

Jumlah rumah tangga kriteria miskin dan sangat miskin di Kecamatan Pintupohan Meranti yaitu 461 KK dari 1750 KK (26,3% dari total jumlah rumah tangga), dan jika ditambah dengan jumlah rumah tangga hampir miskin akan bertambah menjadi 866 KK dari 1750 KK total jumlah rumah tangga (49,5 dari total jumlah rumah tangga seluruhnya), menurut Bappeda dan BPS Kabupaten Toba Samosir (2006). Tingginya jumlah rumah tangga miskin dan sangat

miskin di kecamatan ini merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan raksasa (multinasional) dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memiliki aset sangat besar serta menyangkut hajat hidup orang banyak (sektor energi dan listrik) yang menggunakan teknologi sangat tinggi dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di wilayah Kecamatan Pintupohan Meranti tersebut.

Melihat peran program CSR PT. Inalum PLTA Sigura-gura yang telah diimplementasikan secara internal kepada karyawan dan secara eksternal kepada masyarakat lokal yang tinggal disekitar lokasi perusahaan dan telah diklasifikasikan pada beberapa bidang dan di antaranya adalah bidang pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi dan lingkungan yang diharapkan tepat sasaran dan berhasil guna secara efektif. Karena semua bidang ini akan saling mendukung dan menunjang keberhasilan program dan dapat mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui perluasan lapangan kerja (kesempatan berusaha) dan peningkatan pendapatan dan pendidikan sekaligus diharapkan berhasil menciptakan perkembangan pasar lokal yang dapat dijadikan sebagai salah satu wadah keberhasilan dan kemajuan sosial dan ekonomi di Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

Adapun permasalahan pada tulisan ini adalah 1. Bagaimana format dan konsep CSR yang telah diimplementasikan oleh PT. Inalum (Divisi PLTA)?, 2. Bagaimana CSR berperan terhadap peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Pintu Pohan Meranti? dan 3. Bagaimana korelasi CSR terhadap perkembangan pasar lokal di Kecamatan Pintupohan Meranti?

METODE

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 5 (lima) desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pintupohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara yaitu Desa Ambarhalim, Desa Pintupohan, Desa Halado, Desa Pintupohan Dolok dan Desa Meranti Utara. Kelima desa ini dipilih karena merupakan wilayah jalur transmisi jaringan listrik pada Ring I Divisi PLTA.

2. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh rumah tangga yang ada di kelima desa yaitu Desa Ambarhalim, Desa Pintupohan, Desa Halado, Desa Pintupohan Dolok dan Desa Meranti Utara Kecamatan Pintupohan Meranti.

Dari 84 Rumah Tangga (RT) sampel, didistribusikan ke lima desa tersebut. Jumlah sampel Rumah Tangga menurut desa (penerima manfaat CSR eksternal) diambil berdasarkan *Proportional Random Sampling*.

Pekerja langsung (karyawan tetap) juga akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Pekerja ini mendapat manfaat CSR internal secara langsung melalui jabatan, penggajian, asuransi, pensiun, bantuan dan fasilitas umum.

Sampel yang dipilih dari populasi berdasarkan level/jabatan karyawan, karena populasi yang homogen dan karyawan tinggal di lokasi perumahan yang disediakan perusahaan dengan lingkungan yang homogen berdasarkan strata jabatan maka jumlah sampel rumah tangga menurut level/jabatan/kelompok (*cluster*) diambil berdasarkan *Proportional Random Sampling*, jumlah populasi dan sampel penelitian adalah 27 responden.

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis peran CSR terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat maka yang dianalisis adalah variabel pendidikan dan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui apakah CSR berperan atau tidak akan dilihat apakah adanya CSR dapat meningkatkan pendidikan dan pendapatan, maka digunakan uji beda rata-rata (*compare means*) sebelum Program CSR (tahun 2003) dan setelah adanya Program CSR (tahun 2007) dan analisis korelasi.

HASIL

1. Gambaran Umum Kabupaten Toba Samosir dan Kecamatan Pintupohan Meranti

Secara geografis Kabupaten Toba Samosir terletak di bagian tengah Propinsi Sumatera Utara pada garis koordinat 2⁰³'-2⁴⁰' Lintang Utara dan 98⁵⁶'-99⁴⁰' Bujur Timur. Berada di jajaran pegunungan Bukit

Barisan, Kabupaten Toba Samosir memiliki karakter topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam (datar, landai miring dan terjal) pada ketinggian 300 - 2.200 meter di atas permukaan laut.

Dengan luas wilayah 2.021,80 km, Kabupaten Toba Samosir diapit oleh lima Kabupaten, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Asahan, sebelah selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Samosir.

2. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Kecamatan Pintupohan Meranti terletak di lingkungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan Komplek perumahan PT. Inalum Divisi PLTA beserta fasilitasnya. Luas wilayah kecamatan lebih kurang 45.000 ha yang tersebar di sepuluh desa, dengan jumlah penduduk dominan beragama Kristen Protestan. Tingkat pendidikan penduduk disana umumnya menamatkan Sekolah Tingkat Atas dan mata pencaharian penduduk umumnya bercocok tanam di lahan perkebunan dan persawahan. Hasil pertanian dari perkebunan adalah nilam yang menghasilkan minyak atsiri terbaik dari Sumatera Utara, karet, sawit dan coklat. Hasil pertanian di jual kepada tengkulak atau istilah batak adalah *along-along*.

3. Profil Perusahaan PT. Inalum Divisi PLTA di Kabupaten Toba Samosir

Setelah upaya memanfaatkan potensi sungai asahan yang mengalir dari Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara untuk menghasilkan tenaga listrik mengalami kegagalan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintah Republik Indonesia bertekad mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai tersebut.

Selanjutnya, untuk penyertaan modal pada perusahaan yang akan didirikan di Jakarta kedua belas Perusahaan Penanam Modal tersebut bersama pemerintah Jepang membentuk sebuah perusahaan dengan nama Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd (NAA) yang berkedudukan di Tokyo pada tanggal 25 Nopember 1975.

Pada tanggal 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd., didirikan di Jakarta. INALUM adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan proyek Asahan, sesuai dengan Perjanjian Induk. Perbandingan saham antara Pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. Pada waktu perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut berubah menjadi 25% dengan 75% dan sejak bulan Juni 1987 menjadi 41,13% dengan 58,87%.

PEMBAHASAN

1. Tingkat Pengetahuan (*Awareness*) Responden terhadap Keberadaan Program

Pembangunan bidang infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lainnya) masih banyak yang belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat sekitar PT. Inalum, sebagian besar masyarakat yaitu 72,70% tidak mengetahui atau belum mengetahui keberadaan program-program dalam bidang pembangunan infrastruktur dan hanya 27,30% saja yang mengetahui adanya program pembangunan infrastruktur Program CSR di bidang pendidikan dan *religious* (sosial) merupakan program yang paling banyak diketahui dan diminati oleh masyarakat dibanding bidang sosial lainnya. Dalam bidang pendidikan secara umum terjadi perimbangan antara masyarakat yang mengetahui adanya program pendidikan dengan yang tidak mengetahui dan memahami program di bidang pendidikan. Perbandingan tersebut sebesar 49% masyarakat yang mengetahui adanya program di bidang pendidikan berbanding 51% masyarakat yang tidak mengetahui adanya program di bidang pendidikan.

Dalam CSR bidang *religious* (sosial) yaitu bantuan dalam bidang agama (pendidikan dan penyuluhan) diketahui keberadaannya oleh 44% masyarakat dan selebihnya 56% lagi belum mengetahui, tetapi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana rumah ibadah diketahui oleh 71% masyarakat dan sisanya 29% masih belum mengetahui keberadaan program tersebut.

Tingkat pengetahuan responden terhadap bantuan kesehatan dari PT. Inalum secara umum diketahui keberadaannya oleh sangat sedikit masyarakat 29,5% dan sisanya 70,5% dari masyarakat belum mengetahui keberadaan program CSR menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap CSR bidang kesehatan karena kurangnya sosialisasi program bidang ini terhadap masyarakat padahal bidang ini sangat diminati oleh masyarakat.

Tingkat pengetahuan responden terhadap bantuan kepemudaan dan olahraga dari PT. Inalum secara umum diketahui keberadaannya oleh sedikit masyarakat 28,7% dan sisanya 71,3%.

Tingkat pengetahuan responden terhadap keberadaan program CSR bidang pembangunan ekonomi diketahui oleh 35,5% masyarakat dan hanya diketahui oleh responden dari tiga desa yaitu Desa Pintu Pohan, Desa Ambarhalim dan Desa Halado dan selebihnya 64,5% masyarakat tidak mengetahui keberadaan program.

2. Tingkat Keterlibatan Responden terhadap Keberadaan Program

Keterlibatan masyarakat pada program CSR pembangunan bidang infrastruktur yang menyatakan terlibat adalah 5,90% dan 94,10% menyatakan tidak terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk bidang sosial menyatakan terlibat dalam program adalah 12,40% dan sisanya 87,60% menyatakan tidak terlibat dan hanya menerima bantuan saja. Sedangkan untuk bidang ekonomi dari 35,50% yang terlibat dalam program tersebut hanya 64,50% yang menyatakan dilibatkan meski hanya pada pelaksanaannya saja dan bukan dilibatkan dari awal perencanaan.

3. Peran *Corporate Social Responsibility (CSR) Internal* terhadap Pendidikan dan Pendapatan Karyawan

Hasil analisis uji beda rata-rata (*compare mean*) dengan *t-test with Paired Two Sample for Means* (Data Berpasangan) antara pendidikan karyawan sebelum Program CSR (tahun 2003) dan setelah program CSR (tahun 2007) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pendidikan Karyawan

Pendidikan sebelum (tahun 2003)	9,67
Pendidikan setelah (tahun 2007)	10,91
t-test	-5,80
Sig.	0,0000021*

Keterangan * : Nyata pada $\alpha = 0,05$
 Sumber: Analisis Data Primer

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa t- hitung (-5,80) lebih besar dari pada t-tabel (-1,71), berarti H_0 ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendidikan tahun 2003 dan tahun 2007. Berarti dengan adanya program CSR pendidikan meningkat. Dengan melihat nilai probabilitas, *P-Value* adalah 0,0000021 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ berarti H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan ada perbedaan tingkat pendidikan karyawan tahun 2003 dengan tahun 2007.

Pada tahun 2003 tingkat pendidikan rata-rata sebesar 9,67 tahun dan tahun 2007 rata-rata pendidikan keluarga karyawan meningkat menjadi 10,91 tahun, maka rata-rata peningkatan pendidikan (lamanya bersekolah) keluarga karyawan adalah 2,56% per tahun.

Hasil analisis uji beda rata-rata (*compare mean*) dengan *t-test with Paired Two Sample for Means* (Data Berpasangan) antara pendapatan nominal karyawan sebelum Program CSR (tahun 2003) dan setelah program CSR (tahun 2007) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pendapatan Nominal Karyawan

Pendapatan sebelum (tahun 2003)	3.685.185 (rupiah)
Pendapatan setelah (tahun 2007)	7.111.111 (rupiah)
t-test	-8,60
Sig.	2,21 E-09*

Keterangan * : Nyata pada $\alpha = 0,05$
 Sumber: Analisis Data Primer

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa t-hitung (-8,60) lebih besar dari pada t-tabel (-1,71), berarti H_0 ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan nominal tahun 2003 dan tahun 2007. Berarti dengan program CSR pendapatan nominal karyawan meningkat. Dengan melihat nilai *probabilitas*, *P-Value* adalah 2,21E-09 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan ada

perbedaan tingkat pendapatan nominal karyawan tahun 2003 dengan tahun 2007.

Pada tahun 2003 tingkat pendapatan nominal rata-rata sebesar Rp. 3.685.185,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan tahun 2007 rata-rata pendapatan keluarga karyawan pada meningkat menjadi Rp. 7.111.111,- (tujuh juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) maka rata-rata peningkatan pendapatan keluarga karyawan adalah 18,59% per tahun.

Hasil analisis uji beda rata-rata (*compare mean*) dengan *t-test with Paired Two Sample for Means* (Data Berpasangan) antara pendapatan riil karyawan sebelum Program CSR (tahun 2003) dan setelah program CSR (tahun 2007) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pendapatan Riil Karyawan

Pendapatan sebelum (tahun 2003)	3.685.185 (rupiah)
Pendapatan setelah (tahun 2007)	4.804.267 (rupiah)
t-test	-7,48
Sig.	3,05E-08*

Keterangan * : Nyata pada $\alpha = 0,05$
 Sumber: Analisis Data Primer

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa t-hitung (-7,48) lebih besar dari pada t-tabel (-1,71), berarti H_0 ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan riil tahun 2003 dan tahun 2007. Berarti dengan program CSR pendapatan riil karyawan meningkat. Dengan melihat nilai *probabilitas*, *P-Value* adalah 3,05E-08 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan ada perbedaan tingkat pendapatan riil keluarga karyawan tahun 2003 dengan tahun 2007.

Pada tahun 2003 tingkat pendapatan rata-rata sebesar Rp. 3.685.185,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan tahun 2007 rata-rata pendapatan riil keluarga karyawan pada meningkat menjadi Rp. 4.804.267,- (empat juta delapan ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) maka rata-rata peningkatan pendapatan keluarga karyawan adalah 6,07% per tahun.

4. Peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* Eksternal terhadap Pendidikan, Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Lokal

Hasil analisis uji beda rata-rata (*compare mean*) dengan *t-test with Paired Two Sample for Means* (Data Berpasangan) antara pendidikan masyarakat sebelum Program CSR (tahun 2003) dan setelah program CSR (tahun 2007) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Pendidikan Masyarakat

Pendidikan sebelum (tahun 2003)	6,73
Pendidikan setelah (tahun 2007)	8,21
t-test	-14,19
Sig.	3,25E-24
Keterangan * : Nyata pada $\alpha = 0,05$	
Sumber: Analisis Data Primer	

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa t-hitung (-14,19) lebih besar dari pada t-tabel (-1,66), berarti H_0 ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendidikan tahun 2003 dan tahun 2007 setelah adanya program CSR. Berarti sesudah adanya program CSR pendidikan masyarakat meningkat. Dengan melihat nilai probabilitas, P-Value adalah 3,25E-24 kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan ada perbedaan tingkat pendidikan masyarakat tahun 2003 dengan tahun 2007.

Pada tahun 2003 tingkat pendidikan rata-rata sebesar 6,73 tahun dan tahun 2007 rata-rata pendidikan keluarga masyarakat meningkat menjadi 8,21 tahun, maka rata-rata peningkatan pendidikan (lamanya bersekolah) keluarga karyawan adalah 4,39% per tahun.

Hasil analisis uji beda rata-rata (*compare mean*) dengan *t-test with Paired Two Sample for Means* (Data Berpasangan) antara pendapatan nominal masyarakat sebelum program CSR (tahun 2003) dan setelah program CSR (tahun 2007) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Beda Rata-rata Pendapatan Nominal Masyarakat

Pendapatan sebelum (tahun 2003)	757.583 (rupiah)
Pendapatan setelah (tahun 2007)	1.266.738 (rupiah)
t-test	-4,57
Sig.	0,000016*
Keterangan * : Nyata pada $\alpha = 0,05$	
Sumber: Analisis Data Primer	

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa t-hitung (-4,57) lebih besar dari pada t-tabel (-1,66), berarti H_0 ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan nominal masyarakat sebelum tahun 2003 dan tahun 2007 setelah adanya program CSR. Berarti dengan adanya program CSR pendapatan nominal masyarakat meningkat. Dengan melihat nilai probabilitas, P-Value adalah 0,000016 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 . Hal ini menunjukkan ada perbedaan tingkat pendapatan nominal masyarakat tahun 2003 dengan tahun 2007.

Pada tahun 2003 rata-rata pendapatan nominal rumah tangga masyarakat adalah Rp. 757.583,-/bulan dan pada tahun 2007 rata-rata pendapatan nominal rumah tangga masyarakat meningkat menjadi Rp. 1.266.738,-/bulan, maka rata-rata peningkatan pendapatan nominal rumah tangga masyarakat adalah 13,44% per tahun.

Peningkatan pendapatan nominal masyarakat disebabkan telah terbukanya peluang kerja pada pengusaha lokal yang bermitra sebagai rekanan PT. Inalum yang mempekerjakan penduduk lokal sekitar sebagai karyawan/buruh, sehingga masyarakat petani bisa bekerja di luar musim tanam dan musim panen dan terbuka peluang usaha kecil (sangat sedikit) bagi masyarakat untuk keperluan karyawan-karyawan unit usaha mitra PT. Inalum.

Hasil analisis uji beda rata-rata (*compare mean*) dengan *t-Test with Paired Two Sample for Means* (Data Berpasangan) antara pendapatan riil masyarakat sebelum Program CSR (tahun 2003) dan setelah program CSR (tahun 2007) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Beda Rata-rata Pendapatan Riil Masyarakat

Pendapatan sebelum (tahun 2003)	757.583 (rupiah)
Pendapatan setelah (tahun 2007)	844.206 (rupiah)
t-test	-1,27
Sig.	0,10
Keterangan * : Nyata pada $\alpha = 0,05$	
Sumber: Analisis Data Primer	

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa t-hitung (-1,27) lebih kecil dari pada t-tabel (-1,66), berarti H_0 diterima atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat

pendapatan riil sebelum tahun 2003 dan tahun 2007 setelah adanya program CSR. Berarti dengan adanya program CSR pendapatan riil tidak meningkat. Dengan melihat nilai probabilitas, P-Value adalah 0,10 lebih besar dari 0,05 berarti H_0 diterima. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat pendapatan riil masyarakat tahun 2003 dengan tahun 2007.

Pada tahun 2003 rata-rata pendapatan riil rumah tangga masyarakat adalah Rp. 757.583,-/bulan dan pada tahun 2007 rata-rata pendapatan riil rumah tangga masyarakat meningkat menjadi Rp. 844.206,-/bulan, maka rata-rata peningkatan pendapatan riil rumah tangga masyarakat adalah 4,60% per tahun.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pendapatan riil sebelum tahun 2003 dan tahun 2007 dan rendahnya rata-rata pendapatan riil masyarakat sebesar Rp. 844.206,-/bulan pada tahun 2007 menunjukkan masih lemahnya peningkatan ekonomi masyarakat.

5. Peran CSR Eksternal terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal

Dalam bidang pengembangan ekonomi lokal, perusahaan memperkirakan telah menyerap sekitar 1500 (seribu lima ratus) orang tenaga kerja dalam operasional perusahaan, yang terbagi dalam 2 kategori:

1. Sekitar 1200 (seribu dua ratus) orang bekerja sebagai tenaga kerja di unit usaha mitra perusahaan/kontraktor.
2. 271 (dua ratus tujuh puluh satu orang) orang tenaga kerja langsung perusahaan.

Dari 271 tenaga kerja langsung tersebut sebanyak 61 (enam puluh satu) orang atau sekitar 22,50% berasal dari Kabupaten Toba Samosir, 180 (seratus delapan puluh) orang atau 66,42% berasal dari luar Kabupaten Toba Samosir (dalam Propinsi Sumatera Utara) dan 30 (tiga puluh) orang berasal dari luar Propinsi Sumatera Utara.

Sebanyak 61 (enam puluh satu) orang atau sekitar 22,50% pekerja tetap/karyawan yang berasal dari Kabupaten Toba Samosir tersebut, 23 (dua puluh tiga) orang diantaranya atau sekitar 8,48% adalah masyarakat yang berasal dari Kecamatan Pintupohan Meranti.

Tenaga kerja lokal yang direkrut PT. Inalum dari masyarakat Kecamatan Pintupohan Meranti pada tahun 2003 sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pada tahun 2007 akhir sudah berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang tetapi semua penduduk lokal masih bekerja pada tingkat/level operator. Kualifikasi pendidikan yang masih di bawah standar menyebabkan terbatasnya tenaga kerja lokal yang dapat direkrut oleh PT. Inalum.

Pada tahun 2003 jumlah masyarakat lokal sekitar perusahaan dari Kecamatan Pintupohan Meranti yang dapat diserap 320 orang dan pada tahun 2007 tenaga kerja sebanyak 750 orang menjadi karyawan tetap dan tenaga lepas (*free lance*) yang direkrut dari sepuluh desa. Kekurangannya karyawan dari penduduk lokal diambil dari daerah lain atau kecamatan lain di Kabupaten Toba Samosir maupun dari masyarakat Kabupaten Asahan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pintupohan Meranti.

6. Korelasi Modal/Dana CSR terhadap Perkembangan Pasar Lokal

Sejak tahun 2001 alokasi dana anggaran sebesar Rp. 634 juta dan meningkat menjadi Rp. 1,482 milyar pada tahun 2002. Pada tahun 2003 dengan anggaran meningkat menjadi Rp.1,602 milyar dan tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah anggaran di *Sub Section Public Relation* pada tahun fiskal. Kemudian pada tahun 2006 dan 2007 alokasi dana yang diajukan untuk program CSR meningkat mencapai Rp. 1,811 milyar. Tetapi aktivitas (jam buka) pasar di ibukota Kecamatan Pintupohan Meranti mengalami penurunan yang pada tahun 2001 rata-rata jam buka pasar adalah 3 jam menurun menjadi 2,5 jam pada tahun 2002 terus menurun menjadi 2,0 jam pada tahun 2003 hingga menjadi rata-rata buka pasar 1,0 jam pada tahun 2007.

Selama kurun waktu 7 tahun (2001-2007) rata-rata peningkatan modal atau dana untuk program CSR di Kecamatan Pintupohan Meranti sebesar Rp. 136.879.000,-/tahun. Peningkatan jumlah dana CSR PT. Inalum Divisi PLTA tersebut tidak sejalan dengan aktivitas pasar di ibukota Kecamatan Pintupohan Meranti yang mengalami penurunan rata-rata 0,33 jam/tahun atau sekitar 18% per-tahun.

Hasil Analisis Korelasi antara Modal/Dana CSR dengan Aktivitas pasar dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik Korelasi antara Besarnya Modal CSR dengan Aktivitas Pasar di Kecamatan Pintupohan Meranti

Uraian	Rata-Rata Selama 7 Tahun
Modal/Dana CSR	Rp. 1.451.654.142
Aktivitas Pasar	1,86 jam
Koef. Korelasi (r)	-0,848
Sig. (1-tailed)	0,008*

Ket. * : Nyata pada $\alpha = 0,05$

Sumber: Analisis Data Primer

Hasil analisis uji statistik diketahui bahwa korelasi antara modal/dana CSR dan aktivitas pasar sebesar -0,848. Oleh karena $\alpha = 0,05 > \text{Sig. (1-tailed): } 0,008$, maka korelasi antara kedua variabel tersebut signifikan. Terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai korelasi negatif menunjukkan aktivitas pasar cenderung turun seiring dengan kenaikan modal/dana CSR.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap peran CSR terhadap sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Pintupohan Meranti, diambil beberapa kesimpulan:

1. Format dan Konsep CSR yang telah diimplementasikan PT. Inalum kepada masyarakat adalah:
 - a. PT. Inalum belum memiliki dokumen perencanaan dan strategi dalam pencapaian target dan masih dianggap sebagai biaya (*cost*) sehingga belum memiliki program yang mampu memandirikan dan memberdayakan masyarakat melalui program Pengembangan Masyarakat yang diluncurkan.
 - b. Tingkat pengetahuan dan keterlibatan masyarakat terhadap keberadaan Program CSR PT. Inalum masih rendah menunjukkan PT. Inalum Divisi PLTA belum melakukan pendekatan dalam proses pembentukan tanggung jawab sosial melalui etika moral, keputusan bersama dan etika manfaat.
 - c. Proses pembentukan program CSR bidang pendidikan belum melibatkan *stakeholder* utama (komite sekolah) dan proses Pengembangan Ekonomi

Rakyat (CSR bidang ekonomi) masih bersifat karitas (*charity*) dan belum dapat menggalang partisipasi aktif masyarakat.

2. CSR PT. Inalum memiliki peran dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat diantaranya:
 - a. Pendidikan rumah tangga masyarakat lebih tinggi dari pada pendidikan rumah tangga karyawan dan pendapatan karyawan lebih tinggi dari pendapatan masyarakat (pendapatan nominal dan riil).
 - b. CSR PT. Inalum berperan dalam penyerapan tenaga kerja lokal langsung perusahaan PT. Inalum maupun sebagai tenaga kerja tidak langsung yaitu masyarakat yang bekerja di unit usaha mitra perusahaan/kontraktor.
3. Peran dan korelasi CSR terhadap perkembangan pasar lokal (tradisional) menunjukkan:
 - a. Tidak adanya kebijakan pengembangan ekonomi lokal wilayah dalam program CSR menyebabkan aktivitas pasar lokal semakin mundur sehingga wilayah makin terisolasi dan tidak berkembang meskipun sarana dan prasarana (pembangunan bidang infrastruktur) telah dibangun.
 - b. Konsep pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi antar pemerintah, perusahaan PT. Inalum Divisi PLTA dan masyarakat belum ada sehingga upaya memfasilitasi dalam membuat kebijakan dan membangun kemitraan di antara ketiganya tidak tercipta.

SARAN

1. PT. Inalum harus membuat rencana dan strategi melalui proses pendekatan *stakeholders* dan melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan tanggung jawab sosialnya, menganggap CSR adalah sebuah Investasi Sosial (*Social Investment*) bagi perusahaan dan membuat kebijakan yang cerdas dan strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal yang bersifat produktif.

2. PT. Inalum harus mengembangkan program CSR bidang pendidikan masyarakat dengan dukungan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat membangun sumber daya setempat (lokal) dan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki seperti: membangun Sekolah Menengah Kejuruan Elektro (Listrik) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian.
3. Pemerintah harus mengoptimalkan perannya memahami konteks CSR agar tercipta kesamaan pemahaman (*persepsi*) dengan PT. Inalum, upaya bersama membahas masalah dan kebutuhan masyarakat, menciptakan kerjasama dan komunikasi dua arah dalam memberdayakan masyarakat.
4. Kemitraan antara pemerintah, PT. Inalum dan masyarakat lokal dalam menjalankan proses pembentukan program CSR-nya harus mengkolaborasikan antara proses dari atas (*top down*) dan dari bawah (*bottom up*).

DAFTAR RUJUKAN

- Anonimous, 2005. *Corporate Stakeholder Partnership Toward Productive Relations* (Report Seminar). LEAD INDONESIA bekerja sama dengan LAB-SOSIO FISIP UI, Jakarta.
- _____, 2006. *Company Profile*. PT. Indonesia Asahan Aluminium.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Toba Samosir, 2007. *Toba Samosir dalam Angka*. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Balige.
- _____, 2007. *Validasi Data Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2007*. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Balige.
- Budimanta, A, Prasetyo, A., Rudito, B., 2004. *Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. ICSD, Jakarta.
- Blakely, E.J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory dan Practice*. Sage Publication, Inc. California.
- Evans, H. dan Munir, R, 2005. *Pengembangan Ekonomi Lokal di Indonesia. Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21. Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, URDI-YSS-Jakarta.
- Ichsan, M.S. 2007. *Implementasi Program Community Development di Pertamina UPMS-IV Semarang*. Tesis Program MAP-UGM, Jogjakarta.
- Josua, P, P. 2007. *Pola Kemitraan dalam Praktek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Program Community Development PT. Toba Pulp Lestari, Tbk*. Di Kabupaten Toba Samosir, Tesis Program MAP-UGM, Jogjakarta.
- Kasali, R., 2005. *Management Public Relation*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Kottler, P. and Nancy, L. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For Your Company and Your Cause*. Best Practices From Hewlett Packard, Ben & Jerry's, and Other Leading Companies. Jhon Wiley & Sons, Inc. United States of America.
- Miraza, B. H. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. ISEI Bandung, Bandung.
- Mulyadi. 2003. *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutan*. Materi Seminar. PSKK, Jogjakarta.
- Munir, R. 2002. *Perencanaan Ekonomi Lokal (Local Economic Development)*. Specialist Perform Project, Jakarta.
- Saidi, Z, 2003. *Membangun Corporate Social Responsibility yang Aplikatif dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat*. Materi Training.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Fascho Publishing. Gresik.

WAHANA HIJAU

Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah

INFORMASI BERLANGGANAN

(Biaya Berlangganan: Kota di Sumatera Rp 85.000/tahun dan Kota di luar Sumatera Rp 100.000/tahun)

LEMBAR PEMESANAN

Nama : _____
Alamat : _____
Kota : _____
Telepon : _____ Fax. _____ e-mail _____
Lembaga : _____

Pemesanan Tahun Terbitan: _____

Pembayaran Tunai Transfer

Transfer melalui
Rekening Bank Mandiri Cabang USU Medan
a.n. Muhammad Yusuf
No. Rekening: 106 – 00 – 0512719 – 9

Alamat Redaksi

Ruang Studio, Program Studi PWD (S2)/Perencanaan Wilayah (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Jl. Prof. T. Maas, Kampus USU Medan 20155, Telepon 061-8212453
<http://pwd.usu.ac.id>